

e-news letter

FEB II 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, INOVATIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Amin AK, M.M

PELAJARAN JIWASRAYA

Bagi BUMN Lain untuk Lebih
Profesional dan Baik
Pengelolaannya





Mengajak Berbagi Tanggung Jawab

Alhamdulillah, secara resmi Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI telah mengajukan surat resmi permohonan pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya kepada Pimpinan DPR RI, yang telah dibawa langsung pada hari Selasa (4/2) dan diterima oleh Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI.

Langkah tak berhenti, saat sidang paripurna (6/2) Fraksi PKS ingatkan kembali. Bahwa Pimpinan harus membacakan surat masuk dari kedua partai, kami sadar lelah tak akan menyelesaikan perjuangan. Meski tak sedikit yang mencemooh bahwa langkah ini seakan sia-sia karena jumlah kursi tak cukup daya. Ah kalo soal ini sudah sejak awal paham dan mahfum

Kepercayaan yang

Penuntasan kasus Jiwasraya merupakan salah satu upaya menyelamatkan keuangan negara serta memperbaiki sistem keuangan di lembaga asuransi. Satu kali kayuh dua tiga pulau terlampaui. Tak usah berpeluh keringat, ternyata kita sedang berputar-putar ditanah lapang

membuat kedua partai memilih jalur resmi tersebut, bahwa jalur konstitusional via parlemen akan mampu mengakselerasi penanganan kasus ini lebih baik. Buang jauh-jauh prasangka yang menduga bahwa inisiasi kedua partai mendorong pansus Jiwasraya bermaksud menjungkalakan Pemerintahan yang sah. Jika mau jujur, tidak pernah terlintas sedikitpun dalam pikiran dan benak PKS. Jika ada orang

diluar sana menduga demikian, maka kami saja sulit mencari padanan perasaan dan logikanya sedari awal.

Terlebih jika kemudian mendorong pembentukan Panja di tiga komisi yaitu XI, VI dan III, seraya menolak Pansus Jiwasraya rasanya aneh nan ajaib. Kita bukan hanya sedang berjalan mundur, namun merangkak sambil tersungkur. Karena faktanya Pansus akan jauh lebih efisien dan efektif

dibandingkan Panja, yang sarat dengan keterbatasan. Itikad baik ini sudah sepatutnya ditepuk dengan sambutan antusias dari semua anggota Parlemen, yang setiap langkahnya di Senayan karena jerih payah coblosan rakyat.

Penuntasan kasus Jiwasraya merupakan salah satu upaya menyelamatkan keuangan negara serta memperbaiki sistem keuangan di lembaga asuransi. Satu kali

kayuh dua tiga pulau terlampaui. Tak usah berpeluh keringat, ternyata kita sedang berputar-putar ditanah lapang. Oleh karena itu, Fraksi PKS mengajak fraksi lain untuk ikut bersama-sama membentuk pansus dengan hak angket. Anggap saja ajakan ini sebagai ikhtiar sedang berbagi' tanggung jawab (Responsibility sharing), meski tak harus berbagi kekuasaan (power sharing). Sebagaimana dalam sejumlah bencana dan inisiatif kebaikan tidak menghalangi kami untuk mengambil peran sebagaimana Pemerintah menaunkannya.

Sekali lagi, mari berbagi tanggung jawab

Humas Fraksi PKS DPR RI

PKS dan Demokrat Resmi Ajukan Hak Angket Jiwaseraya ke Pimpinan DPR

Usul Hak Angket ditandatangani 104 pengusul dari dua Fraksi (PKS dan PD). Fraksi PKS full 50 anggota tanda tangan dan Fraksi PD full 54 anggota tanda tangan. Jadi sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU MD3

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (4/2) - Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengajukan penggunaan Hak Angket DPR untuk menyelidiki skandal Asuransi Jiwaseraya kepada Pimpinan DPR yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Selasa (4/2).

Penyerahan Usul Hak Angket dari Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini didampingi Ledia Hanifa, Aboe Bakar Alhabsyi, Adang Daradjatun, Ecky Awal Muharam, Amin Ak, dan Dimiyati Natakusumah. Sementara dari Fraksi PD hadir Hinca Panjaitan (Sekjen PD), Benny K Harman, Herman Khoiron, Vera Pebiyanti, Marwan Cik Asan.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini usul Hak Angket

sudah memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu ditandatangani 104 pengusul dan lebih dari satu fraksi.

"Usul Hak Angket ditandatangani 104 pengusul dari dua Fraksi (PKS dan PD). Fraksi PKS full 50 anggota tanda tangan dan Fraksi PD full 54 anggota tanda tangan. Jadi sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU MD3," ungkap Jazuli.

Argumentasi dan permasalahan kebijakan yang akan diselidiki, lanjut Jazuli, semua tertera dalam usulan yang diajukan dan sudah diakui secara matang dalam mendalam.

"Intinya, kami tegaskan kembali bahwa skandal ini berdampak serius dan

berpotensi sistemik bukan hanya bagi nasabah tapi juga industri jasa keuangan dan BUMN sehingga perlu dibuka secara transparan, dengan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, melibatkan berbagai pihak yang terkait. Sehingga DPR dapat mengawal dan merekomendasikan penyelesaian yang komprehensif dan terbaik," pungkask Jazuli.

Selanjutnya, Jazuli berharap Pimpinan DPR menindaklanjuti usulan Hak Angket ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan di Paripurna DPR.

Jazuli menegaskan usulan Hak Angket Jiwaseraya ini adalah bagian dari komitmen PKS dan Demokrat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang semakin baik dan bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian mudah-mudahan usulan ini bisa disetujui oleh Fraksi-Fraksi lain dan disahkan di Paripurna DPR RI.



PKS: Kasus Jiwasraya Harus Terungkap, Untuk Selamatkan Kepentingan Publik

Dengan adanya pansus kita tentu punya perhatian untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya jiwasraya, namun juga kepentingan publik. BUMN adalah milik rakyat,

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan

Jakarta (04/02) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) telah resmi mengajukan hak angket Jiwasraya dengan menyerahkan surat kepada Pimpinan DPR RI. Dari kedua fraksi total anggota yang telah menandatangani berjumlah 104 orang, terdiri atas 50 Anggota FPKS dan 54 FPD.

Ecky Awal Mucharam Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, dalam kesempatan itu ditunjuk sebagai juru bicara menyampaikan dihadapan wartawan bahwa kasus Jiwasraya penting diungkap untuk menyelamatkan kepentingan publik.

"Dengan adanya pansus

kita tentu punya perhatian untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya jiwasraya, namun juga kepentingan publik. BUMN adalah milik rakyat, kita harus secepat harus menjaganya"

Ecky menambahkan, di Asuransi Jiwasraya ada dana publik sekitar 5,2 juta nasabah, jika dikalikan empat anggota keluarga berarti ada sekitar 20 juta nasabah lebih yang harus diselamatkan. Adapun sekarang kerugian negara dan publik ditengarai mencapai triliunan rupiah, sebagaimana sudah dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan beberapa sumber mencapai 13 triliun.

"kita berharap dengan dibuka kasus jiwasraya seterang-terangnya, publik dan rakyat yang mengontrol kita tidak ingin ada asuransi-asuransi lain yang mengalami kerugian serupa. BUMN milik rakyat Indonesia itu digerogeti dan dirampok dengan organize crime, karena kita ingin menyelamatkan itu semua." tegasnya.

Terakhir, bursa Indonesia sekarang kapitalisasinya sudah mencapai diatas sepuluh ribu triliun, pun aset asuransi kita sudah mencapai 2000 triliun. maka menyelamatkan dan mengungkap kasus jiwasraya akan memperbaiki sistem keuangan kita, khususnya asuransi dan lembaga keuangan non bank.

"mudah-mudahan teman-teman fraksi lain yang menginginkan dana publik, nasabah dan yang ada di BUMN berjumlah jutaan dan ribuan triliun betul-betul bisa diselamatkan mendukung. Agar dalam jangka panjang perekonomian kita lebih baik dengan terbukanya kasus jiwasraya ini" pungkasnya.





Rugikan Negara dan Masyarakat

PKS: Hak Angket Tepat Bongkar Jiwasraya

Negara ini, kata Aboe, sudah banyak asam garam dalam persoalan keuangan. Berkaca dari kasus BLBI dan Bank Century, alangkah lebih bijak jika penanganan kasus Jiwasraya mendapat prioritas tinggi. Jika kemarin pada kasus Century yang kerugian negaranya 6,7 Trilyun saja dibuat angket, kenapa tidak untuk Jiwasraya. Padahal nilainya lebih besar, dan sama sama menjadi atensi publik

Habib ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (04/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy menegaskan persoalan Jiwasraya bukan persoalan kecil.

Menurutnya sampai dengan saat ini, ada kerugian negara yang sangat besar hingga mencapai Rp 13,7 triliun, itu hitungan agustus tahun kemarin, belum lagi kalau dilakukan pendalaman, angka tersebut bisa naik lagi.

"Apalagi Jiwasraya menyatakan kepada DPR mereka membutuhkan dana Rp

32,98 triliun guna memperbaiki struktur permodalannya dan mengakibatkan gagal bayar polis nasabah", tegas

Bendahara Fraksi PKS ini.

Angka tersebut lanjut Habib Aboe, dibutuhkan agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan yakni minimal 120 persen.

"Ini menunjukkan persoalan Jiwasraya cukup dalam dan harus menjadi atensi dari seluruh pihak, termasuk DPR", tandasnya.

Tentunya kata Habib Aboe, DPR memiliki tugas untuk menelaah persoalan Jiwasraya ini, karena ketentuan pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan salah satu fungsi DPR adalah melakukan pengawasan.

"Karenanya kami akan melaksanakan tugas tersebut dengan menggunakan hak angket. Hal ini sesuai dengan ketentuan di UUD 1945, pada ayat dua di pasal yang sama," ungkapnya.

Negara ini, kata Aboe, sudah banyak asam garam dalam persoalan keuangan. Berkaca dari kasus BLBI dan Bank Century, alangkah lebih bijak jika kasus Jiwasraya mendapat prioritas tinggi.

"Jika kemarin pada kasus Century yang kerugian negaranya 6,7 Trilyun saja dibuat angket, kenapa tidak untuk Jiwasraya. Padahal nilainya lebih besar, dan sama sama menjadi atensi publik," tegas pria berkacamata ini.

Bahkan, tutup Habib Aboe, kasus Jiwasraya ini bisa dikatakan lebih parah, karena bukan hanya berdampak pada kerugian negara, namun juga kepada masyarakat luas.





SELAMAT HARI PERS NASIONAL

09 FEBRUARI 2020

*Pers yang Sehat
Pilar Kokohnya
Demokrasi*

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jazuli Juwaini Raih Penghargaan Usai Beri Kuliah Risalah Perjuangan Fraksi PKS DPR

saya surprise dengan dengan perspektif dan pemahaman profesor dan para peneliti yang kritis dan tajam tentang politik Indonesia dan PKS. Saya senang dan menikmati semua perspektif, apresiasasi, kritik dan masukan. Ini memperkaya PKS dan kami terbuka dengan semua itu

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Kyoto (6/1) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menerima penghargaan dari Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Universitas Kyoto di Jepang, Rabu 5-6 Februari 2020. Dirinya didaulat untuk menjadi pembicara tunggal Seminar Akademik yang fokus membahas perjalanan politik Fraksi PKS di DPR RI dengan topik "The Past, Present, and Future of The Prosperous Justice Party (PKS) in The Indonesia's Parliament (DPR)". Jazuli membawakan substansi buku karyanya "Risalah Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI. Seminar yang dihadiri

profesor, peneliti, Doktor dan mahasiswa S2 dan S3 ini adalah forum kajian politik kawasan Asia Tenggara dari Universitas Kyoto dan mitra bestarinya. Hadir dalam seminar antara lain Profesor Okamoto Masaki (ahli politik CSEAS Universitas Kyoto), Profesor Marcus Mietzner (ahli politik ANU Australia), Profesor Yasuko Kobayashi (ahli Politik Universitas Nanzan), Dr. Dede Utomo (Universitas Cornell USA), dll. Jazuli mengaku surprise dengan antusiasme dan analisis peserta yang kritis dan tajam membedah politik PKS dan Indonesia.

"Terus terang saya surprise

dengan dengan perspektif dan pemahaman profesor dan para peneliti yang kritis dan tajam tentang politik Indonesia dan PKS. Saya senang dan menikmati semua perspektif, apresiasasi, kritik dan masukan. Ini memperkaya PKS dan kami terbuka dengan semua itu," ungkap Jazuli usai menjawab semua pertanyaan diskusi yang berlangsung 3 jam.

Jazuli sendiri menyampaikan panjang lebar konteks politik Indonesia dikaitkan karakter kemajemukan bangsa hingga mempengaruhi perjalanan politik PKS. Ketua Fraksi PKS menjelaskan identitas, visi misi dan garis perjuangan Fraksi PKS yang terus eksis dan dinamis baik di pemerintahan maupun di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Alhamdulillah PKS terus berkiprah sejak pertama ikut Pemilu tahun 1999 pasca reformasi dan selalu menempatkan wakilnya di DPR dan DPRD. Dalam rentang itu, posisi dan sikap PKS dinamis. PKS pernah di Pemerintahan dan kini memilih di luar Pemerintahan dengan kesadaran penuh menjaga



sistem demokrasi agar tetap sehat dalam kerangka checks and balances. Untuk itu Fraksi PKS membangun sikap politik yang kritis dan konstruktif terhadap kekuasaan," tegas Jazuli.

Sementara itu peserta seminar antusias bertanya dan mendalami perkembangan

politik PKS mulai dari sikap-sikap terhadap sejumlah isu dan kebijakan sebagai oposisi hingga membahas identitas, karakter dan program Fraksi serta diferensiasinya dengan partai politik politik lain.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Slamet: Omnibuslaw Kebiri Hak Legislasi DPR

Jika hak legislasi DPR berkurang karena UU hanya mengatur hal umum saja maka perimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif tidak terjadi. Jika eksekutif makin absolut, tentu secara teori dia akan makin berpeluang untuk korup dan otoriter

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (05/02) — Omnibuslaw mengubah hak legislasi anggota DPR. Demikian dikatakan anggota DPR RI Fraksi PKS, Slamet kepada media, Senin (03/02).

Menurut Slamet, selama ini DPR hanya membuat aturan yang sifatnya umum. Sementara itu, lanjut dia, aturan yang spesifik diatur oleh pemerintah berbentuk PP atau Permen.

"DPR sebagai wakil rakyat yang diharapkan konstituen memperjuangkan aspirasinya menjadi tak berdaya ketika tidak berbuat maksimal dalam penyusunan Undang-undang," tegasnya.

Slamet menuturkan, saat ini pemerintah menghembuskan ide

menyatakan beberapa UU menjadi satu UU payung dengan sebutan omnibus law.

"Ini artinya, UU hanya akan semakin berbicara general di dalamnya," ungkapnya. Sedangkan spesifiknya, lanjut dia, semakin didorong kearah PP dan Peraturan Menteri (PERMEN).

"Tentu ini pengkebiran hak legislasi DPR. Karena DPR tidak berwenang menjangkau wilayah PP atau PERMEN," tegasnya.

Slamet menjelaskan, sebagian hak legislasi seolah dirampas oleh eksekutif. Memang DPR, kata dia, makin santai dan ringan tanggungjawab legislasinya, tetapi sesungguhnya makin

berat perjuangannya dalam membela aspirasi rakyat

"Omnibus law yang dihebuskan pemerintah menyentuh lini investasi dan perpajakan. Dalamacamata PDB tentu 2 hal ini yang paling strategis," tegas Slamet.

Saat ini saja, lanjut dia, sebagian ahli mempertanyakan ketika presiden menyebut pertumbuhan ekonomi atau PDB berada di 5% dan Menkeu menyatakan pertumbuhan pajak kita berada di 14% .

"Sangat disayangkan pertumbuhan subsidi pemerintah kepada rakyat justru minus (di bawah 0%) alias menurun. Selain itu, pertumbuhan pembayaran hutang juga menurun, sedangkan pertumbuhan utang tetap positif," pungkasnya.

Jika hak legislasi DPR berkurang lanjut Slamet, karena UU hanya mengatur hal umum saja maka perimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif tidak terjadi.

"Jika eksekutif makin absolut, tentu secara teori dia akan makin berpeluang untuk korup dan otoriter," tutup Slamet.

Foto : dpr.go.id





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tolak Kesepakatan AS-Israel 'Deal Of The Century

dunia internasional perlu memberikan tekanan lebih kuat kepada AS-Israel untuk menghentikan kesepakatan ini. Pemerintah RI perlu membawa isu ini dalam rapat DK PBB dan secara proaktif mendorong OKI untuk menyelenggarakan sidang istimewa untuk menyatukan sikap menolak 'Deal of The Century'

H. Sukamta, Ph.D
Anggota Komis I DPR RI

Sukamta Tolak Kesepakatan AS-Israel 'Deal Of The Century'

"Saya juga berharap Komisi I DPR RI mengagendakan rapat dengan Menteri Luar Negeri terkait hal ini serta bombardir Israel terhadap Palestina beberapa hari ini, sekaligus membahas update persoalan negeri-negeri lain Rohingya di Myanmar

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (07/02) — Kesepakatan antara Presiden Trump dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 28 Januari 2020 di Gedung Putih yang disebut Trump sebagai "Deal of The Century", menurut Sukamta merupakan arogansi sikap Amerika Serikat yang mesti ditolak masyarakat dunia.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, menyatakan gagasan 'Deal of The Century' sudah muncul di Tahun 2017 dengan deklarasi Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Saat itu dalam Sidang Umum PBB secara mayoritas 128 negara menolak deklarasi

Trump tersebut, hanya Amerika Serikat dan delapan negara yang mendukung sementara sisanya 35 negara menyatakan abstain.

"Kesepakatan 'Deal of The Century' yang didalamnya masih mencantumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel menunjukkan Trump mengabaikan pendapat mayoritas negara di dunia, ini jelas sikap arogan yang bisa membahayakan proses perdamaian dan juga konsep solusi dua negara," kata Sukamta, Kamis (06/02) di Jakarta.

Menurut Sukamta yang

juga Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini, kesepakatan AS-Israel yang tidak dihadiri pihak Palestina menunjukkan sejak awal ada itikad yang tidak baik, dan ini terbukti dengan wilayah Palestine yang tergambar dalam kesepakatan tersebut semakin mengecil.

Dalam hal ini AS dan Israel mengesampingkan resolusi DK PBB no. 242 yang menuntut Israel menarik pasukannya dari seluruh wilayah yang diduduki dalam Perang Enam Hari tahun 1967 serta 9 resolusi terkait Yerusalem.

"Ada banyak resolusi yang dilanggar dan ini sudah berulang kali dilakukan, menunjukkan PBB tidak berdaya hadapi arogansi AS, ini tentu sangat kita sesalkan," jelas Sukamta.

Sukamta berharap dunia internasional perlu memberikan tekanan lebih kuat kepada AS-Israel untuk menghentikan kesepakatan ini. Pemerintah RI perlu membawa isu ini dalam rapat DK PBB dan secara proaktif mendorong OKI untuk



menyelenggarakan sidang istimewa untuk menyatukan sikap menolak 'Deal of The Century'.

Banyak negara yang muak dengan arogansi AS-Israel dalam soal Palestina, ini bisa jadi momentum untuk mendorong dunia internasional melalui Sidang Umum PBB menaikkan status Palestina sebagai anggota penuh PBB. Hal ini penting agar posisi Palestina semakin kuat dalam diplomasi internasional.

"Saya juga berharap Komisi I DPR RI mengagendakan rapat dengan Menteri Luar Negeri terkait hal ini serta bombardir Israel

terhadap Palestina beberapa hari ini, sekaligus membahas update persoalan negeri-negeri lain Rohingya di Myanmar, pemerintahan India yang agresif terhadap warga Muslim, kasus yang menimpa warga Uyghur di Xinjiang, konflik Kashmir, dan seterusnya. Semoga bangsa Indonesia sebagai negeri dengan jumlah warga Muslim terbesar tetap konsisten peduli dan mendukung perjuangan penegakan hak asasi manusia khususnya di negeri-negeri tadi serta dunia pada umumnya," harap Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR Apresiasi Evakuasi WNI dari Tiongkok

Semua pihak bekerja keras dan kita harus berikan apresiasi, ini menunjukkan bahwa kita tidak akan meninggalkan WNI kita, Negara hadir dan berusaha semaksimal mungkin

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (02/02) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi keberhasilan Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan, TNI dan Kementerian Kesehatan, serta semua stake holder yang telah berhasil mengevakuasi 245 warga negara Indonesia di Wuhan Tiongkok yang berjalan lancar pada hari Sabtu (1/2/2020) lalu.

"Alhamdulillah, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama beberapa stakeholder berhasil membawa pulang Warga Negara Indonesia yang berada di Tiongkok, kembali ke tanah air, semua pihak bekerja keras dan kita

harus berikan apresiasi, ini menunjukkan bahwa kita tidak akan meninggalkan WNI kita, Negara hadir dan berusaha semaksimal mungkin" jelas Kharis dalam release tertulis kepada Media hari Ahad (2/2/2020).

Kharis yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan bahwa Komisi I DPR RI dengan dukungan penuh mendukung semua langkah lanjutan terkait penggunaan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna untuk karantina sementara WNI sesuai aturan Internasional sebagai upaya memulangkan WNI kita ke tanah air.

"Seperti yang dijelaskan

Panglima TNI, pangkalan militer Natuna memiliki fasilitas rumah sakit yang mumpuni dengan letak rumah sakit di pangkalan militer yang tak jauh dari hanggar. Rumah sakit itu juga mampu menampung hingga 300 orang yang Jarak pangkalan militer dengan pemukiman warga, berkisar 6 kilometer dan saya beserta sejumlah Anggota Komisi I DPR RI sudah pernah kesana dan itu benar adanya" terang Kharis yang beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Natuna bersama rombongan Komisi I DPR RI ini.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga berharap kementerian terkait menjaga dan memastikan sterilisasi kawasan sehingga kepulangan WNI menjadi kabar baik untuk Indonesia dan khususnya keluarga.

"Kita harapkan semua WNI dan petugas yang menyertai observasi dan kembali bersama keluarga tanpa kurang apapun, sehat dan kuat, insya Allah" tutup Kharis

Foto : dpr.go.id



Momen Hari Pers Nasional, Ini Pesan Toriq Bagi Wartawan

Media yang sehat harus terdepan dalam menjaga demokrasi dan menangkal hoaks. Sebab, hoaks bisa berdampak luas dan bisa memecah-belah masyarakat dan mengganggu kamtibmas

KH. TORIQ HIDAYAT, LC

Anggota Komisi I DPR RI

Toriq Hidayat berharap peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 tahun 2020 bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh para wartawan. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyajikan informasi berkualitas dan mampu menangkal hoaks.

Menurut anggota Komisi I DPR RI tersebut, seorang jurnalis harus bisa menciptakan sebuah karya jurnalistik yang membangun dan menangkal hoaks. Seorang jurnalis juga harus mampu menyampaikan informasi sesuai fakta di lapangan, tanpa membuat sebuah opini yang bisa memperkeruh suasana.

"Media yang sehat harus terdepan dalam menjaga demokrasi dan menangkal hoaks. Sebab, hoaks bisa

berdampak luas dan bisa memecah-belah masyarakat dan mengganggu kamtibmas," tegas Toriq.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas liputan masih menjadi persoalan yang masih dihadapi para insan pers. Padahal, HPN telah ditetapkan sebagai momen perjuangan kebebasan pers dan kebebasan ekspresi menuju pemerintahan yang demokratis.

"HPN harus menjadi bentuk koreksi dan evaluasi, baik untuk jurnalis itu sendiri maupun perusahaan media. Kita berharap, di HPN ini juga tidak ada lagi bentuk kekerasan kepada para jurnalis di lapangan saat melakukan liputan sesuai dengan kode

etik jurnalistik." ucap politikus PKS tersebut.

Menyambut pilkada tahun 2020, Toriq menjelaskan insan pers memiliki peranan vital dalam suksesnya pilkada serentak 2020 ini.

"Independensi dan netralitas insan pers jelas sangat penting apalagi saat ini akan berlangsungnya pilkada serentak 2020. Mengapa demikian? Karena media sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa dan jembatan informasi yang akan di konsumsi publik harus bisa terus menjaga netralitasnya untuk mencerdaskan masyarakat tentang proses pilkada nanti" jelas Toriq.

Untuk menjalankan peran itu, insan pers perlu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Wartawan harus meningkatkan kualitas diri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik.

"Prestasi dan loyalitas wartawan sebagai pilar demokrasi selama ini sudah baik, pada HPN ini semoga lebih baik. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional," tutup Toriq.



Draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang Beredar Tak Sesuai Konstitusi

Draft tersebut memiliki cacat logika dan konstitusi. Bagaimana bisa program strategis nasional menjadi kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berimplikasi pemberhentian?,"

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (03/02) — Surahman Hidayat, anggota Komisi 2 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyotro draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja versi KADIN yang tersebar luas dimasyarakat.

Surahman menilai draft tersebut memiliki cacat logika dan konstitusi. "Bagaimana bisa program strategis nasional menjadi kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berimplikasi pemberhentian?," tanya Surahman.

Surahman berharap draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang nantinya masuk secara resmi ke DPR RI berbeda dengan draft yang saat ini beredar luas dimasyarakat.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan secara langsung apabila melanggar sesuai dengan

ketentuan pasal 83 UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut kata Surahman, Pasal 83 mengatur bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan tanpa usulan DPRD apabila melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, keamanan negara dan perbuatan yang dapat memecah belah NKRI berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Mensejajarkan tidak menjalankan program strategis nasional dengan tindak pidana yang diatur pasal 83 ayat 1 UU Penda merupakan cacat logika dan konstitusi", ungkapnya.

Apalagi, menurut Surahman, Pasal 83 mensyaratkan adanya putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jadi jika menteri dapat memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional tanpa ada keterlibatan lembaga lain, akan menjadi celah terjadinya a buse of power dan demokrasi kita akan set back jauh kebelakang.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sedangkan menteri dipilih oleh presiden, secara legitimasi kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan menteri", terang Surahman.

Surahman Hidayat mengingatkan bahwa presiden Jokowi pernah menolak kebijakan gubernur Jawa Tengah dalam pembangunan Mall Solo saat masih menjadi Walikota Solo, dengan pertimbangan ingin membuat isi keberadaan mall dan memikirkan keberadaan pasar tradisional.

"Kita bisa memahami sikap pak Jokowi saat masih menjadi walikota, keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan diperlukan dikarenakan mereka yang lebih memahami kondisi dan



permasalahan riil daerahnya masing-masing", tuturnya.

Surahman Hidayat memahami kesulitan pemerintah pusat dalam menjalankan program strategisnya, karena ada daerah yang terkesan tidak sejalan. "Demokrasi merupakan sistem yang membuka ruang terjadinya perbedaan pendapat dan

pandangan, ruang dialog menjadi solusi untuk menjembati perbedaan pendapat yang ada. Pancasila mengajarkan tentang musyawarah dalam mengelola perbedaan pendapat. Dialog dan musyawarah memang membutuhkan waktu dan leadership yang kuat," tutur Surahman

Brigjen Polisi Wahyu Jabat Kapolda Aceh, Nasir Djamil: Terimakasih Kapolri

Aceh butuh keamanan yang kondusif agar investor yakin menanamkan modalnya. Kehadiran Jenderal Wahyu diharapkan bisa meningkatkan rasa percaya Pemerintahan di Aceh bahwa polisi adalah bagian dari aktor pembangunan

H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI Dapil Aceh

Jakarta (05/02) — Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil menyambut baik dan berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, yang telah menunjuk Brigadir Jenderal (Brigjen) Wahyu Widodo menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh.

Kehadiran Kapolda Aceh Wahyu Widodo diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum yang bermartabat.

Seperti diberitakan bahwa belum lama ini Kapolri menerbitkan telegram terkait

pergantian dan mutasi perwira tinggi dan menengah. Dalam telegram Kapolri itu, sejumlah Kapoldes di wilayah hukum Aceh juga mengalami pergeseran dan pergantian.

"Kapolda Aceh Rio Jambak diganti Wahyu Widodo. Mewakili rakyat Aceh, saya apresiasi regenerasi di tubuh Polda Aceh. Jenderal Wahyu lulus terbaik (adhi makayasa) tahun 1991," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (5/2/2020).

Menurut salah satu tokoh muda Aceh ini, saat ini Aceh sedang berupaya untuk melakukan pembangunan dan menarik investasi dari luar.

Karena itu selain ketersediaan energi dan regulasi, soal kepastian hukum menjadi sangat penting.

"Aceh butuh keamanan yang kondusif agar investor yakin menanamkan modalnya. Kehadiran Jenderal Wahyu diharapkan bisa meningkatkan rasa percaya Pemerintahan di Aceh bahwa polisi adalah bagian dari aktor pembangunan," tegas Ketua Forum Bersama anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh ini.

Ke depan kata dia, sejumlah upaya peningkatan profesionalisme dan disiplin serta hidup sederhana aparat kepolisian, perlu mendapat perhatian dari Kapolda Aceh yang baru.

"Rakyat Aceh berharap penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi prioritas Kapolda Aceh guna mengembalikan kepercayaan publik kepada korps bhayangkara tersebut," urainya.

Terakhir, politisi yang telah duduk empat periode di Komisi Hukum DPR itu mengharapkan agar Kapolda Jenderal Wahyu



bisa membangun komunikasi dua arah dan konstruktif dengan jajaran pimpinan pemerintahan di Aceh, baik di provinsi maupun kabupaten kota.

"Kita ingin institusi Polda Aceh di bawah kepemimpinan Jenderal Wahyu menjadi

menara air yang mampu bersinergi dengan semua pemangku kepentingan guna menyelesaikan pembangunan di segala bidang," tutup Nasir Djamil.

Foto : dpr.go.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Berpuluh Tahun BUMN Pangan Tak Sehat, Kedaulatannya Jadi Sorotan

Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Berpuluh Tahun BUMN Pangan Tak Sehat, Kedaulatannya Jadi Sorotan

Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (07/02) — Anggota DPR komisi IV, Andi Akmal Pasluddin menyortir BUMN pangan yang sejak zaman presiden Suharto hingga saat ini masih belum memberikan dampak kontribusi pencapaian kedaulatan pangan.

BUMN pangan yang ia maksud tersebar pada berbagai sektor bisnis, baik perikanan kelautan, pertanian maupun peternakan.

Pada sektor pertanian ada Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PTPN dan PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia). Pada sektor Perikanan kelautan ada PT Perinus, PT Perindo, PT. Minabahari dan PT Garam. Sedangkan pada sektor peternakan ada PT Berdikari

(Persero).

"Beberapa BUMN pangan seperti PT. Pertani, Sang Hyang Seri dan Perum Bulog, selalu mendapat PSO (Public Service Obligation) melalui DPR di Komisi IV. Termasuk pada Perusahaan-perusahaan pupuk yang nilainya menyamai anggaran kementerian pertanian. Namun hingga kini kedaulatan pangan masih saja belum tercapai. Perlu ada evaluasi mendalam ada apa ini sebenarnya ?", tukas Akmal.

Legislator Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengamatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

"Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia", ungkapnya.

Namun pada kenyataannya, lanjut Akmal, badan Pangan sebagai amanat UU Pangan yang disahkan oleh DPR bulan Oktober 2012, hingga saat ini pemerintah tidak juga membentuknya. Padahal, Badan Pangan ini akan memiliki posisi sangat strategis dengan harapan keberadaan badan otoritas pangan bisa terhindar dari benturan kepentingan atau ego sektoral terkait.

"Badan Pangan akan berfungsi sebagai pembuat kebijakan pangan sekaligus operator pangan. Badan Pangan akan bertugas melaksanakan pengadaan, produksi, penyimpanan, hingga distribusi



pangan nasional", tutur Akmal.

Dilain Pihak, Lanjut Akmal, BUMN pangan yang tersebar di berbagai sektor masih belum mampu memberi kontribusi percepatan swasembada yang berujung pada kedaulatan pangan. Berbagai PSO di BULOG, Pertani, Sang Hyang Seri, dan subsidi pupuk yang mencapai puluhan triliun tiap tahun tidak mampu secara signifikan mengangkat harkat martabat petani.

"Hampir seluruh PSO yang diambil dari APBN dikelola oleh

korporasi selama ini masih berjalan dan korporasi tersebut semua adalah plat merah. Ditengarai banyak pihak, bahwa PSO yang selama ini dikelola perusahaan pemerintah ini, seringkali dijadikan ajang bisnis. Padahal peruntukannya untuk semaksimal mungkin pelayanan pada masyarakat", demikian dikatakan anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

Foto : dpr.go.id

Usai Kunspek di Jatim, Johan Ajak Pemerintah Hentikan Impor Sampah

Jangan sedikit-sedikit impor. Masa semuanya kita impor. Mulai dari beras, garam, lalu sekarang sampah lagi. Lalu kemandirian kita sebagai suatu bangsa dimana? Malu lah kalau terus-terusan bergantung dari bangsa lain

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Surabaya (02/02)— Menanggapi permasalahan Sampah Impor yang sempat menjadi isu hangat beberapa hari terakhir, Johan Rosihan angkat bicara ketika melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) bersama anggota Komisi IV DPR-RI di Desa Bangun, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto Jawa Timur kemarin (01/02).

Hal itu berawal dari hasil sidak Komisi IV DPR RI sebelumnya di Tanjung Priok, yang telah menemukan sebanyak 70 kontainer sampah.

"Sampah itu menurut keterangan disebutkan berasal dari Amerika Serikat, Inggris,

dan Australia yang diimpor oleh PT NHI", kata Johan.

Menurut Johan, Jumlah ini cukup besar, apalagi hasil temuan lapangan menunjukkan akan ada tambahan sebanyak 1.015 kontainer sampah impor yang akan masuk melalui seluruh pelabuhan di Indonesia.

"Fenomena ini sangat memprihatinkan. Jika mengacu pada data yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah grata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun," tambah

Johan.

Johan mengaku, apabila menggunakan asumsi berdasarkan data itu, sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kilogram (kg). Bahkan, berdasarkan studi yang dirilis oleh McKinsey and Co dan Ocean Conservancy, Indonesia disebut sebagai negara penghasil sampah plastik nomor dua di dunia setelah Tiongkok.

"Di tengah situasi seperti itu, mengapa Indonesia masih saja mengimpor sampah?" Ungkap Anggota DPR-RI dari dapil NTB 1 itu.

Kekejalannya itu disampaikan kepada wartawan SinergiNTB ketika melakukan Kunspek bersama rekan-rekan di KOMISI IV DPR RI.

Johan bersama anggota KOMISI IV lainnya melakukan Kunjungan di dua Desa di Jawa Timur. Pertama Desa Tropedo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Pada kesempatan berdialog dengan masyarakat yang rata-rata menjadi pengusaha tahu, Johan Dan Anggota Komisi IV lainnya



menemukan fakta bahwa sampah digunakan sebagai salah satu bahan bakar.

Menuju lokasi kedua, yaitu di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Purworejo. Ia bersama Anggota KOMISI IV DPR-RI lainnya melihat bahwa para warga di tempat tersebut bekerja sebagai pemilah sampah daur ulang dari berbagai negara. Dari pekerjaan tersebutlah mereka bertahan hidup.

"Kami sengaja datang demi mengecek dan melihat

langsung fakta lapangan" Jelasnya kepada Sinergi NTB.

Ketika ditanya soal bolehnya Impor Sampah, Anggota DPR RI dari PKS ini menjelaskan bahwa, Secara regulasi, memang tidak ada larangan mengimpor scrap kertas dan scrap plastik sebagai bahan baku. Yang dilarang adalah mengimpor sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Cegah Virus Corona, Komisi V DPR Dukung Pemberlakuan Zona Karantina Kapal

“Tak hanya jalur udara, jalur laut juga rentan menjadi pintu masuknya virus corona. Karena itu, kami mendukung pemberlakuan zona karantina kapal-kapal asing khususnya dari China yang akan berlabuh di Indonesia.

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (08/02) — Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sositomo mendukung langkah pemerintah mewajibkan zona karantina pada kapal-kapal dari China yang akan berlabuh ke Indonesia guna mencegah masuknya virus corona melalui jalur laut.

“Tak hanya jalur udara, jalur laut juga rentan menjadi pintu masuknya virus corona. Karena itu, kami mendukung pemberlakuan zona karantina kapal-kapal asing khususnya dari China yang akan berlabuh

di Indonesia. Apalagi, jumlah kapal asal China yang masuk ke Indonesia sangat banyak dan membawa ribuan ABK. Jika tidak dilakukan upaya preventif, wabah virus corona bisa mudah masuk ke Indonesia,” kata Sigit yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk memastikan upaya pencegahan masuknya virus corona melalui jalur laut, Sigit meminta Kemhub mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan Organisasi Maritim Internasional atau International

Maritime Organization (IMO).

IMO sendiri telah menerbitkan circular letter kepada seluruh Negara Anggota IMO, para pelaut, dan perusahaan pelayaran, menyusul adanya deklarasi “keadaan Darurat Global” dari World Health Organization (WHO) atas berjangkitnya Virus Corona.

“IMO sudah mengeluarkan Circular Letter yang memuat informasi dan panduan tentang tindakan pencegahan yang harus diambil untuk meminimalkan risiko terhadap pelaut, penumpang, terutama yang berada di kapal-kapal yang berlayar di antara pelabuhan-pelabuhan di negara-negara yang terdampak virus Corona. Hibauan ini hendaknya diikuti,” kata Sigit.

Seperti diketahui, Kemenhub telah menginstruksikan kepada seluruh stakeholder transportasi laut untuk melakukan upaya-upaya antisipasi pencegahan masuknya virus corona ke



Indonesia. Salah satunya dengan memberlakukan zona karantina ditengah laut untuk kapal-kapal yang berasal dari China.

Untuk kapal barang, pemeriksaan terhadap awak kapal dilakukan di atas kapal. Sementara untuk pemeriksaan

terhadap penumpang kapal, Petugas Kesehatan Pelabuhan memasang alat deteksi panas tubuh atau thermal scanner di pintu terminal kedatangan penumpang, terutama yang melayani pelayaran internasional.

Syahrul Aidi Dukung Pemerintah Tutup Akses Menuju dan Dari Cina

Kemampuan SDM dan peralatan pendukung harus tersedia, siap pakai dan mumpuni. Kita juga harus mewaspadaai barang impor dari negara selain Cina, yang bisa jadi hanya transit saja di negara tersebut, yang sebelumnya berasal dari Cina

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (03/02) — Setelah adanya kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang menutup segala akses perhubungan baik laut dan udara, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPR RI Komisi V, H Syahrul Aidi Maazat.

Syahrul Aidi saat dihubungi pada Ahad (02/02/2020) malam menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah itu telah tepat dan perlu ditindaklanjuti dengan serius.

"Virus Wuhan saat ini telah menjadi ancaman internasional. Tak terkecuali bagi kita di Indonesia. Kewajiban bagi

pemerintah dan DPR untuk menjamin virus tidak turut menyebar di negara kita. Untuk itu, kita dukung langkah pemerintah," terang Syahrul.

Selain menutup akses menuju dan dari Cina, Syahrul Aidi juga menekankan pemerintah juga mengetatkan pendatang, khususnya warga negara Cina yang masuk ke Indonesia melalui negara yang lain. Ini menurutnya menghindari terjadinya penularan virus.

"Pemerintah jangan segan dengan pemerintah Cina. Dalam keadaan ini mereka akan memaklumi tindakan kita. Kita harus menjamin

keselamatan. Jangan sampai nanti telah mewabah baru tindakan serius dilakukan. Kita tentu lebih mencintai warga negara kita." Ungkapnya tegas.

Novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) atau Virus Corona yang berasal dari Wuhan, China, telah menyebar ke 25 negara lebih mengkhawatirkan otoritas kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Sebanyak 11.944 (termasuk 11.822 di China, Hong Kong dan Makau) mengkonfirmasi kasus infeksi coronavirus baru termasuk 259 kematian telah dilaporkan di seluruh dunia pada 1 Februari 2020.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah Virus Corona Wuhan sebagai darurat kesehatan masyarakat global. AS juga menyatakan wabah itu sebagai darurat kesehatan masyarakat pada 1 Februari. Bandara di seluruh dunia mengerahkan langkah-langkah skrining untuk mengisolasi penumpang dengan gejala yang terkait dengan penyakit tersebut untuk menekan penyebaran penyakit.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jiwasraya Jadi Pelajaran bagi BUMN Lain

"Anda harus mengubah mindset menjadi penanam pohon jangan hanya menjadi penikmat buah. Visi itu harus jangka panjang dengan membangun pondasi yang kokoh agar bisa meninggalkan legacy yang baik bagi bangsa ini"

Amin AK,M.M

Anggota Komisi VI DPR RI

Jiwasraya Pelajaran bagi BUMN Lain, untuk Lebih Profesional dan Baik Pengelolaannya

“Anda harus mengubah mindset menjadi penanam pohon jangan hanya menjadi penikmat buah. Visi itu harus jangka panjang dengan membangun pondasi yang kokoh agar bisa meninggalkan legacy yang baik bagi bangsa ini

AMIN AK, M.M

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (06/02) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta para direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan beribaku membangun kultur baru dengan spirit professional.

Menurut Amin Ak, mayoritas BUMN saat ini kondisinya sangat memprihatinkan sehingga perlu reformasi total agar bisa sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara, bukan lagi jadi beban negara.

Hal itu disampaikan Amin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Wakil Menteri BUMN, Budi Sadikin

dan para Direktur Utama BUMN sektor pangan di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (05/02/2020).

Amin menambahkan terpukunya BUMN akibat lemahnya tata kelola perusahaan (GCG) yang dijalankan.

“Anda harus mengubah mindset menjadi penanam pohon jangan hanya menjadi penikmat buah. Visi itu harus jangka panjang dengan membangun pondasi yang kokoh agar bisa meninggalkan legacy yang baik bagi bangsa ini,” tegas Amin.

Skandal Jiwasraya, lanjut Amin, seakan menjadi pembuka kotak pandora. Bahwa tata kelola atau GCG pada BUMN-BUMN kita umumnya buruk.

Padahal dengan kapasitas keuangan yang begitu besar, seharusnya BUMN itu dikelola dengan baik.

Karena bagaimana pun, masalah tata kelola ini berdampak pada kinerja perusahaan. Banyak BUMN yang merugi, dan pada BUMN yang untung pun nilai Return on asset (ROA) nya rendah, hanya sekitar 1-2% saja.

“Memang ada sejumlah BUMN yang assetnya meningkat, ekuitas juga meningkat tapi bukan dari hasil kinerja tapi dari penyertaan modal negara (PMN) atau dari hutang. Ini menyedihkan,” lanjut Amin.

Menurut Amin, para pemegang amanah di jajaran direksi dan komisaris BUMN itu semestinya mengacu pada UU No 19/2003 tentang maksud dan tujuan dirikannya BUMN.

Sekedar mengingatkan, lanjut Amin, maksud dan tujuan dirikannya BUMN ada lima, yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;



mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

“Tata kelola perusahaan yang baik penting dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus yang terjadi seperti sekarang ini. Banyak BUMN yang melakukan praktik window dressing atau manipulasi pembukuan keuangan perusahaan nasional yang terjadi di Garuda, Jiwasraya, dan Asabri,” pungkasnya.

UU Kemitraan Ekonomi Komprehensif

Fraksi PKS: Semoga Bermanfaat bagi Negara dan Rakyat Indonesia

Saya meminta kepada pemerintah dan seluruh stake holdernya agar dapat memberikan perhatian pada pandangan fraksinya. Semoga tujuan utama bangsa kita pada pencapaian kemakmuran bersama sedikit-demi sedikit dapat terwujud. Asal semua berkomitmen, InshaAllah cita-cita bangsa kita tercapai

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (06/02) — Anggota DPR Komisi VI FPKS, Nevi Zuairina pada pembacaan pandangan umum terhadap pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, la-Cepa) harus benar-benar dikaji secara matang, dengan harapan kerjasama kemitraan yang terjalin dapat memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

Fraksi PKS melalui Nevi menekankan berdasarkan penggalan informasi yang telah

diperoleh. Ia memaparkan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yang perlu dicermati bersama.

Diantaranya adalah aspek perlindungan industri dalam negeri, dan aspek neraca perdagangan Indonesia terkait dengan rencana kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Australia.

"Jika dilihat dari pos tarif yang rencananya dibebaskan, Australia hanya membebaskan 6.474 pos barang impor dari Indonesia, sedang membebaskan Indonesia hanya membebaskan 10.813 pos barang impor dari

Australia. Kementerian Perdagangan Indonesia melaporkan, pada tahun 2018 neraca perdagangan Indonesia-Australia mengalami defisit sebesar US\$ 3 miliar, dimana ekspor yang dilakukan Indonesia sebesar US\$ 2,8 miliar sedangkan impor dari Australia sebesar US\$ 5,8 miliar", urai Nevi.

Adapun catatan fraksi PKS yang disampaikan legislator asal Sumatera Barat II ini antara lain :

Pertama, kata Nevi, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia harus dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia.

"Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia harus dapat mengendalikn impor untuk melindungi Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagaimana amanat UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014



Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyerahkan pandangan mini fraksi kepada Pimpinan rapat. (Foto : dpr.go.id / Azka/mr)

pasal 54 ayat (3)", papar Nevi.

Ketiga, lanjut Nevi, Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan barang tidak serta merta dapat menghilangkan ketentuan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman baik kemasan maupun olahan.

"Saya meminta kepada pemerintah dan seluruh stake holdernya agar dapat memberikan perhatian pada pandangan fraksinya. Semoga tujuan utama bangsa kita pada pencapaian kemakmuran bersama sedikit-demi sedikit dapat terwujud. Asal semua berkomitmen, InshaAllah cita-cita bangsa kita tercapai", tutup Nevi Zuairina.



Pemerintah Harus Perketat Pengawasan Barang Impor dari Cina

Kemampuan SDM dan peralatan pendukung harus tersedia, siap pakai dan mumpuni. Kita juga harus mewaspadai barang impor dari negara selain Cina, yang bisa jadi hanya transit saja di negara tersebut, yang sebelumnya berasal dari Cina

MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (03/02) — Merebaknya Virus Corona di Kawasan Cina dan menyebar ke berbagai negara, hingga memakan banyak korban jiwa, memberikan kekhawatiran serius termasuk di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman.

Menurut Mahfudz, mau tidak mau kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, termasuk jajaran di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

"Jangan karena kita lengah, membuat kita akhirnya kecolongan. Persoalan Virus Corona merupakan persoalan sangat serius, dan sudah menjadi persoalan global,"

ungkap Mahfudz.

Pemerintah kata Mahfudz, harus memperketat masuknya barang impor khususnya dari Cina, serta meningkatkan koordinasi dengan jajaran terkait di setiap pintu gerbang masuk barang impor dari luar negeri.

"Kita patut bersyukur sampai saat ini Indonesia masih aman dari wabah Virus Corona, kita memberikan apresiasi dengan tindakan pemerintah yang sejauh ini responsif dan juga intens memberikan informasi kepada masyarakat. Namun kita tidak boleh lengah karena bagaimanapun Indonesia merupakan negara terbuka dan terkoneksi secara global, sehingga kita harus memperketat pengawasan

barang impor dari luar negeri, khususnya saat ini dari negara Cina," demikian disampaikan Mahfudz Abdurrahman di Jakarta.

Mahfudz yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah Pemilihan Kota Bekasi di Kota Depok menyampaikan jajaran Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan semua pihak yang bertanggungjawab terhadap arus masuk dan keluar barang dari Indonesia, harus bekerja sangat serius, untuk menjaga keselamatan negara (national safety) dari masuknya barang yang kemungkinan sudah terkontaminasi virus corona.

"Kemampuan SDM dan peralatan pendukung harus tersedia, siap pakai dan mumpuni. Kita juga harus mewaspadai barang impor dari negara selain Cina, yang bisa jadi hanya transit saja di negara tersebut, yang sebelumnya berasal dari Cina," tandasnya.

Pemerintah, lanjut Mahfudz, harus benar-benar meneliti asal barang (place of origin) dan memeriksa manifes dengan teliti.

"Jika terlihat meragukan, jangan segan

untuk ditolak masuk!". Tegass Mahfudz

Menurut Mahfudz, kita tidak bisa memungkir saat ini barang impor dari Cina mendominasi arus barang impor di Indonesia, sehingga bila ada masalah yang terjadi.

"Bisa dipastikan akan berdampak besar terhadap perdagangan di dalam negeri. Tapi kita tidak boleh mengambil resiko, keselamatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dan kita semua harus bekerjasama untuk tetap menjaga keamanan barang impor yang dicurigai

terkontaminasi virus corona tidak masuk ke Indonesia", ungkapnya.

"Saya meyakini jajaran pemerintah saat ini bekerja sangat serius dan siap siaga untuk menjaga agar virus corona tidak masuk ke Indonesia, dan kami di DPR RI mendukung semua langkah yang dilakukan pemerintah". Tutup Mahfudz Abdurrahman





PKS Kecam BPIP Intervensi BRIN

Tupoksi BPIP khusus terkait pembinaan ideologi Pancasila, bukan masuk ke masalah teknis organisasi lembaga riset dan inovasi. Kebablasan jika BPIP bicara soal kelembagaan BRIN. Biarkan Pemerintah bekerja sesuai prinsip good governance

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (05/02) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengemukakan sikap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang terkesan ikut campur urusan teknis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Mulyanto pun menanyakan kapasitas kelembagaan BPIP yang menjadi pembicara di Rapat Koordinasi Nasional Kemennistek/BRIN di Puspitek, Tangerang, (30/01/2020).

Menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, tupoksi BPIP khusus terkait pembinaan ideologi Pancasila, bukan masuk ke masalah teknis organisasi lembaga riset dan inovasi.

"Kebablasan jika BPIP

bicara soal kelembagaan BRIN. Biarkan Pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip good governance," tegas Mulyanto.

Mulyanto meminta Pemerintahan Jokowi tegas dalam masalah profesionalisme dan good governance.

"Jangan sampai kementerian dan lembaga bekerja di luar tupoksi yang sudah digariskan. Pemerintah harus dijalankan berdasarkan sistem dan perundang-undangan. Bukan berdasarkan kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu," tandas Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Industri dan pembangunan.

Mulyanto mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK) BRIN dibentuk untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbang/jirap) teknologi dari hulu ke hilir, mulai dari invensi hingga inovasi secara terintegrasi.

"BRIN diarahkan menjadi satu-satunya lembaga pelaksana litbang/jirap IPTEK Pemerintah. Diharapkan dengan pembentukan BRIN terjadi konsolidasi, sinkronisasi, integrasi dan efisiensi pelaksanaan litbang/jirap IPTEK nasional," tegasnya.

Dengan tugas yang berat seperti itu, Mulyanto berharap BRIN bebas dari intervensi. BRIN harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sistem manajemen yang tertata rapi. Mekanisme koordinasi dan pengawasannya harus sesuai dengan asas profesionalisme.

"Ujung-ujungnya kita berharap kehadiran BRIN bisa meminimalisasi kemungkinan tumpang tindih program litbang/jirap IPTEK dan menghindari terjadinya pemborosan agar riset yang sudah terbatas itu", tandas Mulyanto.



Bukhori Sayangkan Menteri Agama Terkesan Remehkan Rumah Ibadah

Cara pandang yang hanya melihat dari sisi material saja kurang tepat, seharusnya beliau melihat secara substansial dan arti sebuah rumah ibadah yang menjadi cermin ketuhanan dan ibadah

KH. BUKHORI, Lc., M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (02/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyayangkan tanggapan Menag terkait perusakan Musholla Al-Hidayah Desa Tumulutung Sulut terkesan kurang menghormati arti sebuah rumah ibadah.

Perusakan yang dilakukan oleh 50 orang dari organisasi kemasyarakatan Waraney ini menjadi sorotan di berbagai media sosial beberapa hari lalu.

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan statement Menag yang hanya membandingkan satu musholla dengan ribuan musholla yang ada, merupakan penodaan terhadap kerukunan

umat beragama dan melanggar hak asasi manusia (HAM), karena ini hanya memandang dari sisi materi dan bersifat parsial.

"Cara pandang yang hanya melihat dari sisi material saja kurang tepat, seharusnya beliau melihat secara substansial dan arti sebuah rumah ibadah yang menjadi cermin ketuhanan dan ibadah," ungkap Bukhori.

Menurut Bukhori, sikap merusak meski hanya kecil itu juga merupakan sikap radikal ekstrim yang membahayakan.

"Sikap Menag yang lebih penting selain mengembalikan bangunan adalah menciptakan

rasa aman dan nyaman bagi pemeluk agama dalam beribadah", pungkasnya.

Ungkapan Fachrul Rozi yang meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing justru sebaliknya.

"Statement Menag yang terkesan tidak menghormati ini akan menimbulkan masyarakat menjadi terpancing", tandasnya.

Selanjutnya, Bukhori mengungkapkan bahwa pemerintah harus berani untuk menindak sikap radikal yang destruktif sesuai Pancasila dan prinsip kebhinekaan.

Foro : dpr.go.id



Rapat bersama BPS

Nur Azizah Minta Data Warga Miskin terus Diperbarui

Seharusnya BPS melakukan update data dalam 1 Tahun 2 kali, yaitu bulan Juli & Desember, mengingat bulan itu negara kita terjadi bencana seperti Banjir, Longsor, dan sebagainya. Mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan, memang harusnya satu tahun dua kali, mengingat terjadinya bencana berpengaruh terhadap kondisi Ekonomi masyarakat

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (07/02) — Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid mempertanyakan kevalidan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI, Kamis, (06/02/2020).

Menurut Nur Azizah, seharusnya BPS melakukan update data dalam 1 Tahun 2 kali, yaitu bulan Juli & Desember, mengingat bulan itu negara kita terjadi bencana seperti Banjir, Longsor, dan sebagainya.

"Mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan, memang harusnya satu tahun dua kali, mengingat terjadinya bencana berpengaruh terhadap kondisi Ekonomi masyarakat," ungkap Nur Azizah Tamhid.

Perlu diketahui, berdasarkan Data dari BPS per Desember 2019 komoditi yang memberi pengaruh terhadap garis kemiskinan ada 2 meliputi Komoditi Makanan & Non Makanan.

Menurut Nur Azizah,

Kategori Komoditi Makanan yang mempengaruhi garis kemiskinan 3 teratas adalah Beras 25,82%, Rokok kretek filter 10,37% dan Telur 3,47%

"Kategori Komoditi Non Makanan yang mempengaruhi garis kemiskinan 3 teratas adalah Perumahan 7,14%, Bensin 3,74%, Listrik 2,02%", paparnya.

Anggota DPR Fraksi PKS ini menambahkan, Garis Kemiskinan (GK) per Rumah Tangga Miskin Per September 2019 rata-rata 1 rumah tangga miskin memiliki 4,58 anggota rumah tangga.

"GK Nasional Rp. 440.538 /kapita & Rp. 2.017.664/rutamiskin", sebutnya.

Presentase Penduduk Miskin, kata Nur Azizah, pada September 2019 sebesar 9,22% menurun 0,19% terhadap maret 2019 & menurun 0,44% terhadap September 2018.

"Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta jiwa, menurun 0,36 juta jiwa terhadap Maret 2019 & menurun 0,88 juta jiwa



terhadap September 2018", terang Nur Azizah Tamhid.

Sebagaimana perlu diketahui bahwa Rekapitulasi Data Kependudukan seluruh Indonesia Jumlah penduduk pada semester II Tahun 2019

adalah 267.289.750 jiwa (Lk =135.216.153 jiwa & pr = 132.073.597 jiwa).

Foto : dpr.go.id

Netty Soroti Minimnya Komunikasi antar Pemerintah, Terkait Observasi WNI dari Wuhan

Wajar kalau kemudian terjadi kepanikan yang berujung pada reaksi unjuk rasa. Pemda-nya saja baru tahu sehari sebelum kedatangan WNI dari Wuhan. Jadi, pemda tidak memiliki kesempatan untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan dapat memberikan ketenangan pada masyarakat

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (05/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetyani, menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan karantina yang dilakukan terhadap 238 WNI dari Wuhan.

Anggota komisi IX tersebut menyayangkan, komunikasi antar pemerintah pusat dan daerah yang kurang sigap. Hal tersebut disampaikan kepada Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, saat Rapat Dengar Pendapat, Selasa (4/2).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna menjelaskan penolakan warga Natuna atas penempatan WNI

dari Wuhan dimana apa yang diterima pihaknya hanya sehari sebelum kedatangan WNI dari Wuhan.

"Wajar kalau kemudian terjadi kepanikan yang berujung pada reaksi unjuk rasa. Pemda-nya saja baru tahu sehari sebelum kedatangan WNI dari Wuhan. Jadi, pemda tidak memiliki kesempatan untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan dapat memberikan ketenangan pada masyarakat," ujar Netty.

Sebagaimana diberitakan, WNI dari Wuhan akan dikarantina di Lanud Raden Sadjad, Natuna, selama 14 hari

ke depan untuk kepentingan observasi dan monitoring kondisi mereka.

Dalam rapat tersebut, kata Netty, Bupati Natuna meminta pemerintah pusat membangun posko-posko pelayanan kesehatan masyarakat guna mengantisipasi situasi kritis mengingat jarak lokasi karantina dengan pemukiman penduduk hanya sekitar 1,7 km.

"Masyarakat juga meminta agar biaya berobat ditanggung pemerintah mengingat rumah sakit yang ada di Natuna hanya tipe C. Butuh rujukan ke Batam untuk pengobatan lanjutan," katanya.

Menurut Netty, permintaan masyarakat Natuna tidak berlebihan dan seharusnya bisa dipenuhi pemerintah.

"Setidaknya bisa dibangun rumah sakit tipe B," katanya.

Selain itu, lanjut Netty, pola komunikasi dengan pemda dan masyarakat harus diperbaiki. "Gunakan semua saluran komunikasi yang ada, berikan informasi up date, terus menerus dan jelas guna menenangkan masyarakat," pungkas Netty.

Netty pun mengapresiasi langkah Menkes yang akan berkantor sementara di Natuna



guna memantau langsung kegiatan observasi dan isolasi tersebut.

"Jika diperlukan, saya dan Komisi IX siap turun ke Natuna untuk memantau situasi dan menenangkan masyarakat," ujarnya.

Ditanya terkait informasi dari Menaker Ida Fauziah yang menyebutkan ada satu pekerja migran Indonesia di Singapura yang telah positif terjangkit Corona, Netty meminta

Pemerintah untuk memastikan yang bersangkutan telah mendapat layanan kesehatan sesuai prosedur.

"Komunikasikan keadaannya dengan keluarga di tanah air. Dan ingatkan semua pekerja kita di sana untuk tetap waspada dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak tertular virus Corona," tutup Netty.

Mufida Minta Pemerintah Jamin Kesehatan Masyarakat Natuna

Pemerintah perlu secara memadai melaksanakan upaya-upaya perlindungan kepada warga Natuna terutama yang terdekat dari lokasi karantina WNI dari Wuhan

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (04/02) — Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengapresiasi langkah pemerintah mengevakuasi WNI dari episentrum wabah Virus Corona di Wuhan dan sekitarnya di Tiongkok.

Kendati begitu, pemerintah dinilai lemah dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna yang mengkhawatirkan warganya terdampak Virus Corona.

Hal ini disampaikan Mufida dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan terkait wabah Virus Corona yang telah ditetapkan WHO sebagai wabah global,

Senin 3 Februari 2020.

Meski menilai pemerintah lambat memutuskan dibanding negara lain dalam mengevakuasi warganya dari Wuhan, menurut Mufida, pemerintah tetap perlu diapresiasi.

Yang disayangkan adalah penempatan para WNI yang dievakuasi tersebut di Natuna untuk menjalani observasi selama 14 hari, tidak dilakukan dengan koordinasi yang memadai dengan pemerintah daerah setempat.

WNI yang baru dievakuasi dari Wuhan sudah dinyatakan lolos screening sebelum terbang kembali ke Indonesia, namun tetap harus diisolasi selama periode inkubasi untuk

memastikan mereka bebas dari Virus Corona.

"Jika dilakukan koordinasi sejak awal dengan baik, melibatkan kepala daerah dan para tokoh masyarakat setempat serta sosialisasi kepada warga Natuna, maka keresahan masyarakat setempat tak perlu terjadi," tandas anggota DPR asal Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri ini.

Mufida mengaku bisa memahami kecemasan warga Natuna mengingat dampak Virus Corona yang mendunia. Jika warga melalui Pemda setempat, diberi pemahaman yang memadai sebelumnya, tentu tak perlu terjadi gejala. Karena itu, Mufida mengingatkan agar pemerintah dapat memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat di Natuna dalam arti mereka tidak tertular virus Corona yang dikuatirkan terbawa oleh WNI yang dievakuasi dari Wuhan.

"Pemerintah perlu secara memadai melakukan upaya-upaya perlindungan kepada



warga Natuna terutama yang terdekat dari lokasi karantina WNI dari Wuhan," tegas Mufida.

Mufida meminta ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Pemerintah daerah setempat dalam memberikan perlindungan dan

memastikan warga masyarakat di Natuna sehat semuanya.

"Warga Natuna juga perlu terus dipantau kondisi kesehatannya dan diberikan sosialisasi dan pemahaman yang baik tentang upaya untuk mencegah diri tertular virus Corona," pungkas Mufida.

الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا
إنا لله وإنا إليه راجعون



Atas nama keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah
Ibunda dari Wakil Ketua Komisi X
Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.

Ibu Hj. Muniroh

Wafat pada Ahad 9 Februari 2020, di Cileungsi,
Bogor. Insya Allah dimakamkan pada
Senin, 10 Febrari 2020 di Slawi,
Kab. Tegal, Jawa Tengah

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik Jannah-Nya Amin



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Fikri Faqih: Persiapan PON XX 2020 Papua Perlu Percepatan

“Ada sejumlah PR yang perlu diselesaikan dalam waktu yang sempit sehingga kami di Komisi X menginisiasi rapat gabungan dengan Komisi I, II, III bersama mitranya masing-masing di bidang keamanan, pemerintahan daerah dan hukum

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (05/02) — Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendesak pemerintah pusat membantu percepatan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua yang akan digelar Oktober – November mendatang.

“Ada sejumlah PR yang perlu diselesaikan dalam waktu yang sempit sehingga kami di Komisi X menginisiasi rapat gabungan dengan Komisi I, II, III bersama mitranya masing-masing di bidang keamanan, pemerintahan daerah dan hukum,” ujarnya usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/2).

Fikri mengatakan, PR tersebut bukan hanya sekedar venue tetapi juga sejumlah hal lain seperti keamanan,

pelaksanaan Pilkada, anggaran hingga cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Hal-hal tersebut dibahas untuk ditindaklanjuti oleh komisi dan institusi terkait, misalnya soal anggaran yang masih kurang Rp 2,3 triliun dari total Rp 4,8 triliun kita serahkan ke Banggar untuk mendorong agar cepat terpenuhi, kemudian soal 11 Pilkada yang akan diserahkan ke Komisi II, apakah boleh diundur atau bagaimana,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut Fikri menyoroti soal venue yang baru 1 selesai dari 9 venue yang dibangun dengan APBN yaitu Balai Diklat Penerbangan, salah satu instansi di bawah Kementerian Perhubungan. “Delapan venue

masih tahap pengerjaan,” tambah dia.

Adapun venue yang harus ditargetkan rampung sebelum Juli 2020 itu adalah: Istora Papua Bangkit, Aquatik Papua Bangkit, Hockey Doyo Baru, Cricket Doyo Baru, Panahan, Sepatu roda, dan Dayung. Sementara itu, venue lainnya dibangun melalui dana APBD Provinsi Papua dan APBD kabupaten/kota, baru 4 venue yang sudah selesai pembangunannya.

Selain venue, pekerjaan rumah terkait PON XX adalah soal akomodasi peserta. Total jumlah atlet yang ikut serta dari 37 cabang olahraga adalah 6.442 atlet. Ditambah dengan ofisial dan panitia lainnya terdapat total 22.235 peserta.

“Bila berkumpul dalam satu acara, seperti opening ceremony, dipastikan ada yang tidak kebagian kamar hotel,” urai Fikri.

Diketahui, opening ceremony rencananya akan dilaksanakan di Stadion Utama Papua Bangkit, 18 km dari pusat kota Jayapura. Ketersediaan kamar hotel menurut data Pemprov Papua hanya terdapat 2.800-an kamar hotel di seluruh Kab. Jayapura



dan Kota Jayapura.

“Skenario untuk menampung 22 ribu peserta dengan akomodasi hanya 2.800 kamar itu harus diantisipasi,” kata Fikri.

Menurut Fikri soal pengadaan peralatan pertandingan yang masih dalam

proses lelang juga perlu mendapat perhatian.

“Meningat waktu yang sudah dekat, apakah intervensi pusat diperlukan dalam hal pengadaan peralatan yang cukup vital ini,” tambah Fikri.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Lemahnya Kondisi Ekonomi, Anis Pertanyakan Pembiayaan Pembangunan Ibukota Baru

"Tingginya resiko, minimnya partisipasi swasta dan proses tender yang sulit membuat skema ini butuh waktu lama untuk berkembang. Oleh karena itu pembangunan proyek pemindahan ibukota, dengan menggunakan skema KBPU dan nilai pembiayaan yang mencapai Rp 250 triliun, perlu dipertanyakan

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

Lemahnya Kondisi Ekonomi

Anis Pertanyakan Pembiayaan Pembangunan Ibukota Baru

“Tingginya resiko, minimnya partisipasi swasta dan proses tender yang sulit membuat skema ini butuh waktu lama untuk berkembang. Oleh karena itu pembangunan proyek pemindahan ibukota, dengan menggunakan skema KBPU dan nilai pembiayaan yang mencapai Rp 250 triliun, perlu dipertanyakan

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (06/02) — Proyek pembangunan ibukota baru, menjadi salah satu topik utama yang disoroti anggota komisi XI DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas yang digelar Selasa, (04/02/2020) di gedung DPR .

Dalam paparannya, Menteri PPN menyampaikan rencana Bappenas terkait aspek pendanaan proyek pembangunan ibukota baru dimana APBN hanya bisa menanggung 19% dari total kebutuhan keseluruhan pembiayaan.

Secara rinci, rencana pembangunan ibukota baru melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun dari total anggaran sekitar Rp 466 triliun. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bahwa APBN bukan sumber pendanaan utama dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Mayoritas pembangunan dilakukan dengan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Skemanya bisa

melalui investasi langsung dari swasta atau BUMN. Selain itu juga terdapat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Terkait dengan hal ini, Anis Byarwati anggota komisi XI dari fraksi PKS mempertanyakan kebijakan pembiayaan yang akan dipakai oleh pemerintah.

“Sangat mengkhawatirkan dana yang berasal dari APBN hanya 19,2 persen, sementara sisanya akan menggunakan skema KPBU dan swasta,” kata Anis.

Skema KPBU artinya ada kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (swasta dan BUMN) dengan skema tertentu seperti Build-Operate-Transfer (BOT) atau skema lainnya.

Pada skema KPBU, umumnya Badan Usaha yang akan melakukan pembangunan, pengoperasian dan perawatan, dengan timbal balik berupa keuntungan yang didapatkan ketika mengoperasikan proyek.

Anis mengingatkan bahwa skema KPBU sudah lama diterapkan di Indonesia, dulu disebut sebagai skema Kerjasama Pemerintah Swasta



(KPS). Semenjak diterapkan pada tahun 2005, baru sekitar Rp 25 triliun proyek infrastruktur yang memakai skema ini.

“Tingginya resiko, minimnya partisipasi swasta dan proses tender yang sulit membuat skema ini butuh waktu lama untuk berkembang.

Oleh karena itu pembangunan proyek pemindahan ibukota, dengan menggunakan skema KBPU dan nilai pembiayaan yang mencapai Rp 250 triliun, perlu dipertanyakan,” pungkasnya.

Pertumbuhan di bawah 5,3 Persen, Pemerintah Gagal Kelola Ekonomi

Alasan yang sering diungkap pemerintah terkait pertumbuhan rendah adalah faktor kondisi ekonomi global yang belum kondusif. "Sebenarnya kalau dihitung-hitung, porsi eksternal tidak begitu dominan pada ekonomi Indonesia, Ekspor hanya mengisi sekitar 18 persen sedangkan investasi langsung 32 persen

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (06/02) — Publik tentu kecewa dengan kinerja pemerintah, yang hanya mampu memberikan pertumbuhan ekonomi 5,02% pada 2019. Target tumbuh tinggi meroket tinggal hanya janji manis. Padahal Indonesia punya modal besar untuk tumbuh tinggi.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan kegagalan mencapai pertumbuhan menjadi catatan buruk di awal pemerintahan Jokowi jilid II. Angka itu jauh dari target 5,3% pada APBN-2019.

"Menurut catatan saya, selama periode 2015-2019,

pemerintah selalu gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi, padahal target RPJMN Pemerintah adalah 7 persen," Ujarnya di Senayan, Jakarta (06/02/2020).

Ecky menambahkan alasan yang sering diungkap pemerintah terkait pertumbuhan rendah adalah faktor kondisi ekonomi global yang belum kondusif.

"Sebenarnya kalau dihitung-hitung, porsi eksternal tidak begitu dominan pada ekonomi Indonesia, Ekspor hanya mengisi sekitar 18 persen sedangkan investasi langsung 32 persen," kata Ecky.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyatakan poin lainnya adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah, komponen itu hanya bergerak 3,25 persen dibandingkan lalu.

"Padahal faktanya, pemerintah sudah sangat leluasa dalam mengelola anggaran, terutama pada belanja bantuan sosial. Belanja tersebut terlaksana sekitar Rp113 triliun atau 110 persen dari target. Sayangnya, itu pun gagal dimanfaatkan," keluh Ecky.

Foto : dpr.go.id



Dihadapan Akademisi, DPR Paparkan Kekurangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk UU yang demokratis serta hasil dari pembahasan tersebut rentan mengalami uji materi (judicial review) karena sifatnya yang cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pembentukan dan sangat singkat

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (6/2) Anggota DPR Komisi III Adang Daradjatun memaparkan sejumlah kekurangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dihadapan civitas Akademisi di Universitas Indonesia.

"Bila diterapkan di Indonesia dikhawatirkan tidak sejalan dengan sistem hukum, karena Indonesia yang menganut civil law system, mengingat konsep omnibus law lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut common law system" papar Adang Daradjatun dihadapan civitas Akademisi Universitas Indonesia (UI) pada hari Kamis, (6/2) di

Depok.

Diskusi "Menyikapi omnibus Law. Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan kerja" hadir sebagai narasumber para begawan hukum seperti Maria Farida Indrati Guru Besar Perundang-undangan FH UI, Satya Arinanto Guru Besar Hukum Tata Negara FH UI, Maria S.W Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria FH UGM, dan Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian Sekretaris Kabinet.

Wakapolri periode 2004 - 2006 ini menambahkan, dengan sifat pembahasan yang cepat dan merambah banyak

sector Omnibus Law dikhawatirkan akan mengenyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang undangan yang demokratis yaitu memungkinkan mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

"Memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk UU yang demokratis serta hasil dari pembahasan tersebut rentan mengalami uji materi (judicial review) karena sifatnya yang cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pembentukan dan sangat singkat" lugas Adang.

Adang menyimpulkan, dengan adanya tumpang tindih peraturan, hyperegulasi, dan disharmonisasi regulasi selama ini membuktikan bahwa Indonesia sesungguhnya memang membutuhkan trobosan baru dalam penyederhanaan dan pengharmonisasian yang efektif melalui konsepsi Omnibus law.

"Penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia



harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan memperhatikan prinsip yang ada"

Sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi; sesuai dengan

peraturan perundangan yang mengatur tentang penyusunan regulasi; tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat dalam penyusunan regulasi.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

INTERUPSI RAPAT PARIPURNA

Transparansi Kasus Jiwasraya perlu Hak Angket

Agar kasus korupsi seperti ini tidak terjadi lagi, kasus ini harus ditangani secara transparan komprehensif dan tuntas Siapa pelaku dan penikmatnya? Berapa jumlahnya? Disimpan atau diinvestasikan dimana?Terkait hal tersebut saya sudah mengusulkan hak angket yang sudah diterima oleh pimpinan DPR RI.

Amin AK,M.M

Anggota Komisi VI DPR RI

Anggota DPR Usulkan Segera Bentuk Pansus Jiwasraya

saat ini seakan terjadi perbedaan dalam menyikapi kasus yang hampir sama yaitu gagal bayar perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya dengan nilainya mencapai Rp 13,7 triliun. Untuk itu, kalau melihat dengan dana sebesar itu, tentunya harus ada gaung lebih besar, ada harapan yang lebih besar. Seharusnya DPR RI mengambil sikap secara keseluruhan

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Anggota DPR RI Sakinah Aljufri menyampaikan gagasan perlunya DPR RI untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Gagasan tersebut disampaikan Sakinah dalam interupsi pada Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020)

"Kami berharap pimpinan sidang terhormat memberikan perhatian kepada rakyat, bangsa, dan negara ini dengan membentuk Pansus Jiwasraya," ujar Sakinah pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin

oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

Dalam interupsinya, ia mengingatkan, di ruang yang sama ketika Rapat Paripurna periode terdahulu pernah tercetus gagasan pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century. Selanjutnya, seperti diketahui bersama, pada akhirnya gagasan pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century disepakati pembentukannya oleh 503 Anggota DPR RI dari 9 Fraksi yang hadir saat itu.

"Waktu itu sepakat untuk

membuat Pansus Century akibat skandal Bank Century sebesar Rp 7,4 triliun," tutur politisi Fraksi PKS itu.

Menurut Sakinah, saat ini seakan terjadi perbedaan dalam menyikapi kasus yang hampir sama yaitu gagal bayar perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya dengan nilainya mencapai Rp 13,7 triliun." Untuk itu, kalau melihat dengan dana sebesar itu, tentunya harus ada gaung lebih besar, ada harapan yang lebih besar. Seharusnya DPR RI mengambil sikap secara keseluruhan," tandas legislator dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

Menyikapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin jalannya Rapat Paripurna menyampaikan, Pimpinan DPR RI menyerahkan pembentukan Pansus Jiwasraya sesuai kepada mekanisme dan aturan yang berlaku dalam tata tertib. "Silahkan Bapak, Ibu, khususnya Ibu Sakinah untuk mengajukan dan menelurkan suatu Pansus melalui mekanisme dan tata tertib," pungkasnya. (pun/es)

Foto : dpr.go.id



Saadiah Usul Kementerian LHK Kembali Jadi Mitra Komisi VII

Komisi VII juga tengah menyiapkan dan membahas RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam prolegnas prioritas yang mengatur optimalisasi pemanfaatan EBT untuk kemandirian dan ketahanan energi nasional serta menjaga lingkungan hidup berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan inilah maka KLHK seharusnya bisa dipastikan kembali menjadi mitra kerja Komisi VII

SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (08/02) — Komisi VII DPR RI saat ini sedang mendalami revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Di mana persoalan lingkungan hidup menjadi aspek yang mengemuka sebagai dampak pertimbangan.

Terkait hal tersebut, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kembali dijadikan sebagai mitra kerja Komisi VII DPR RI.

"Komisi VII juga tengah menyiapkan dan membahas RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam prolegnas prioritas yang mengatur optimalisasi pemanfaatan EBT untuk kemandirian dan ketahanan energi nasional serta menjaga lingkungan hidup berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan inilah maka KLHK seharusnya bisa dipastikan kembali menjadi mitra kerja Komisi VII. Sehingga kemitraan strategis bisa berjalan secara optimal Kementerian," tutur Saadiah

saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Hal lain yang juga menurutnya perlu mendapat perhatian adalah pernyataan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang menyebut bahwa tenaga honorer sebagai beban negara. Walaupun ada catatan yang disampaikan bahwa keberadaan tenaga honorer ini tanpa dibarengi dengan perencanaan anggaran yang baik.

"Bagaimana nasib pegawai honorer dalam organisasi pegawai pemerintah, di mana mereka telah mengabdikan selama puluhan tahun. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap pegawai honorer kita ini. Jangan sampai ada istilah habis manis sepah dibuang," tandasnya.

Ia menyatakan, dedikasi tenaga honorer kepada negara ini adalah nyata adanya. "Datanglah ke beberapa daerah 3T, (tertinggal, terdepan dan terluar) ada guru-guru honor, ada pegawai-pegawai kesehatan honor, mereka hanya



mendapatkan dana pengabdiannya 100.000 sampai 300.000 rupiah saja," ungkapnya.

Lewat Sidang Paripurna DPR RI itu, Saadiah menyampaikan beberapa hal yang pertama skema pemerintah untuk pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang rencananya diselesaikan pada tahun 2021.

"Berikan prioritas kepada mereka tenaga honorer yang telah ada. Selain itu, pengangkatan ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, beri perhatian dan prioritas khusus kepada para tenaga honor yang mengabdikan terutama di daerah terpencil untuk diangkat menjadi ASN atau PPPK," pungkasnya.

INTERUPSI

RAPAT PARIPURNA DPR KE 10

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 - 2020



SLAMET

Mekanisme yang merusak jadwal rapat Komisi

Mekanisme rapat paripurna kita tidak baik, merusak jadwal rapat komisi, dan menimbulkan perspektif jelek bagi rakyat kita karena banyak anggota dewan tidak hadir. mohon agar diperbaiki



MULYANTO

Pemerintah jangan lemah hadapi Swasta

Pemerintah harusnya tidak cukup hanya dengan mendorong atau mengimbau PLN untuk renegotiasi dengan IPP terkait klausul take or pay. Pemerintah harus bisa memaksa pihak swasta meninjau ulang keberadaan klausul tersebut dengan memperhatikan kondisi objektif yang dihadapi PLN



SAADIAH
ULUPUTTY

Nasib Pegawai Honorer

"Bagaimana nasib pegawai honorer dalam organisasi pegawai pemerintah, di mana mereka telah mengabdikan selama puluhan tahun. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap pegawai honorer kita ini. Jangan sampai ada istilah habis manis sepelehibung,"



JUNAIDI AULY

Segera tindaklanjuti usulan hak Angket

"Manipulasi laporan keuangan, sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan serta adanya dugaan lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian BUMN,"



AMIN AK

Cukup Kasus Jiwasraya jadi pelajaran

Agar kasus korupsi seperti ini tidak terjadi lagi, kasus ini harus ditangani secara transparan komprehensif dan tuntas. Siapa pelaku dan penikmatnya? Berapa jumlahnya? Disimpan atau diinvestasikan dimana? Terkait hal tersebut saya sudah mengusulkan hak angket yang sudah diterima oleh pimpinan DPR RI.

Junaidy Auly Tegaskan Pimpinan DPR Tindaklanjuti Usulan Hak Angket

Fraksi PKS melihat ada beberapa catatan terkait persoalan Jiwasraya, yakni adanya potensi kerugian negara yang sangat besar dan dugaan masalah kejahatan yang terorganisir. Manipulasi laporan keuangan, sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan serta adanya dugaan lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian BUMN

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (06/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidy Auly kembali menegaskan pentingnya DPR dalam mengungkap skandal Megaproyek Jiwasraya yang merugikan negara Rp. 13,7 triliun.

Menurut Junaidy Fraksi PKS melihat ada beberapa catatan terkait persoalan Jiwasraya, yakni adanya potensi kerugian negara yang sangat besar dan dugaan masalah kejahatan yang terorganisir.

"Manipulasi laporan keuangan, sehingga mengaburkan publik dalam

menilai kinerja perusahaan serta adanya dugaan lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian BUMN," tegas Junaidy dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, (06/02/2020).

Junaidy menambahkan pihaknya juga sangat menginginkan adanya penyelesaian kasus Jiwasraya, terutama terhadap 5,2 juta nasabah kategori menengah ke bawah, agar tidak ada yang dirugikan.

"Kondisi ini sudah menjadi perhatian yang cukup besar dari masyarakat Indonesia, karena

sudah ada pelibatan antar sektor serta mitra dari beberapa komisi," terang Junaidy.

Lebih lanjut Junaidy menyampaikan bahwa hingga kini sudah ada surat masuk ke pimpinan DPR terkait dengan usulan Pansus hak angket Jiwasraya yaitu dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

"Agar usulan Pansus hak angket yang sudah masuk ke pimpinan DPR atas masalah yang terjadi pada Jiwasraya segera ditindaklanjuti," tutup Junaidy.



Mulyanto Kritik Pemerintah, Lemah Hadapi Perusahaan Listrik Swasta

Pemerintah harusnya tidak cukup hanya dengan mendorong atau mengimbuai PLN untuk renegotiasi dengan IPP terkait klausul take or pay. Pemerintah harus bisa memaksa pihak swasta meninjau ulang keberadaan klausul tersebut dengan memperhatikan kondisi objektif yang dihadapi PLN

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (07/02) — Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menyayangkan sikap Pemerintah yang dinilai terlalu lembek bernegosiasi dengan pihak Independent Power Producer (IPP) terutama dalam hal pemberlakuan klausul "take or pay".

Harusnya kata Mulyanto, Pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan produsen listrik swasta tersebut dengan menolak ketentuan "take or pay". Sebab ketentuan itu membebani keuangan negara.

"Take or pay adalah suatu

ketentuan dalam perjanjian kerjasama produksi listrik oleh perusahaan swasta atau yang biasa disebut IPP, yang mewajibkan pihak pemerintah dalam hal ini PLN untuk membeli semua listrik yang dihasilkan", ungkap Mulyanto.

Bagi pihak swasta, menurut Mulyanto, ketentuan ini diperlukan agar ada jaminan pengembalian biaya operasional yang sudah dikeluarkan. Namun bagi pemerintah kebijakan ini menjadi beban yang tidak ringan. Karena pemerintah

harus membeli listrik meskipun persediaan listrik yang akan didistribusikan melebihi dari kapasitas yang diperlukan.

"Pemerintah harusnya tidak cukup hanya dengan mendorong atau mengimbuai PLN untuk renegotiasi dengan IPP terkait klausul take or pay. Pemerintah harus bisa memaksa pihak swasta meninjau ulang keberadaan klausul tersebut dengan memperhatikan kondisi objektif yang dihadapi PLN," tegas Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kelistrikan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia, Rabu (5/2).

Mulyanto mengingatkan, sesuai amanah UUD 1945, pasal 33, Pemerintah sebagai representasi negara harusnya bisa menguasai sumberdaya setrum ini untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu Pemerintah tidak boleh kalah dari swasta dalam hal penguasaan sumberdaya listrik ini.

"Ini mendesak untuk diselesaikan agar beban Pemerin-



tah tidak bertambah berat karena harus membeli listrik lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dengan ketentuan seperti ini tidak heran jika harga listrik ditingkat pelanggan menjadi lebih mahal," ujar Mulyanto.

Lebih lanjut Mulyanto meminta Pemerintah mengembangkan langkah strategis agar program pengadaan listrik oleh pihak swasta lebih adil dan efisien. Sehingga harga jual listrik kepada konsumen lebih terjangkau.

"Sepertinya ke depan nanti, dari sisi hulu pembangkit

Pemerintah harus meningkatkan peran dan posisi tawar BUMN listrik nasional. Jangan sampai pembangkit listrik didominasi oleh IPP yang akhirnya malah mendikte harga listrik kepada kita", pungkasnya.

Selain itu, Mulyanto meminta Pemerintah juga harus mampu menyusun perencanaan kebutuhan listrik nasional secara lebih akurat. Agar tidak ada kejadian over supply listrik yang ujung-ujungnya hanya menjadi beban kita semua.

Fraksi PKS Soroti Agenda Rapat Paripurna yang Tak Efektif

Mekanisme rapat paripurna kita tidak baik, merusak jadwal rapat komisi yang sedang berjalan. Bagaimana persepsi masyarakat saat melihat kursi anggota DPR banyak yang terlihat kosong saat Rapat Paripurna berlangsung. Kondisi ini menimbulkan perspektif jelek bagi rakyat kita, karena banyak anggota dewan tidak hadir

drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (07/02) — Rapat Paripurna Anggota DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (06/02/2020) menuai protes sejumlah anggota dewan.

Salah satunya anggota DPR RI Fraksi PKS Slamet, yang menyoroti tidak efektif nya Rapat Paripurna DPR RI karena diadakan mendadak.

"Mekanisme rapat paripurna kita tidak baik,

merusak jadwal rapat komisi yang sedang berjalan", tegas Slamet.

Slamet menambahkan bagaimana persepsi masyarakat saat melihat kursi anggota DPR banyak yang terlihat kosong saat Rapat Paripurna berlangsung.

"Kondisi ini menimbulkan perspektif jelek bagi rakyat kita, karena banyak anggota dewan tidak hadir," ungkapnya.

Slamet memohon kepada pimpinan DPR untuk memperbaiki jadwal dan mekanisme Rapat Paripurna ke depan.

Tak hanya itu, Slamet pun mengusulkan, lebih baik pimpinan DPR tetap menggunakan hari Selasa sebagai hari penyelenggaraan Rapat Paripurna seperti sebelumnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SDN SAMUDRAJAYA 04

0135-0136



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN TARUMAJAYA

SDN SAMUDRAJAYA 04

KP. TAMBUN TIGA BAGIAN DESA SAMUDRAJAYA
KECAMATAN TARUMAJAYA

SDN 04 Samudrajaya : Viral, Dikunjungi Syaikhu, Disusul Bupati Bekasi dan Diperbaiki

*Saya mengapresiasi Bupati. Responsnya
cepat. Terimakasih sudah bersama-sama
mengatasi masalah ini*

H. Ahmad Syaikhu

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Barat VII



Ahmad Syaikhu saat meninjau kondisi Sekolah SDN Samudrajaya 4 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.

SDN 04 Samudrajaya Viral, Dikunjungi Syaikhu, Disusul Bupati Bekasi dan Diperbaiki

Saya mengapresiasi Bupati. Responsnya cepat. Terimakasih sudah bersama-sama mengatasi masalah ini

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota DPR RI Dapil Jabar VII

Bekasi (07/02) — Sekolah SDN Samudrajaya 4 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi akhirnya diperbaiki. Sekolah ini sempat viral di media sosial, setelah siswa di sekolah itu membuat video meminta bantuan akibat sekolahnya rusak parah, atapnya jebol, ubinnya mengelupas, dan sebagian tanpa jendela.

Perbaikan dimulai sejak pekan ini setelah Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menengok langsung kondisi sekolah tersebut. Di sela kunjungannya itu, Eka memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang segera melakukan perbaikan. Oleh karena itu, sejak kemarin atap sekolah dilakukan perbaikan.

Jauh sebelum Eka turun ke lapangan, lebih dulu Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu meninjau ke lokasi, setelah beberapa hari video viral di media sosial. Syaikhu mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan. Dia pun berjanji akan menyampaikan kondisi parah SDN 04 Samudrajaya kepada Bupati Bekasi Eka.

Janji itu ditepati. Syaikhu bertemu Bupati Bekasi di kantornya, Komplek Pemerintah

Daerah Kabupaten Bekasi di Delta Mas, pekan lalu. Syaikhu meminta pemerintah segera turun tangan.

"Tolong Pak Bupati, SDN 04 Samudrajaya segera diperbaiki," pinta Syaikhu.

"Sesegera mungkin diperbaiki," jawab Bupati Eka. Dan janji itu ditepati pula oleh Bupati. Syaikhu mengapresiasi respons cepat Bupati.

"Saya mengapresiasi Bupati. Responsnya cepat. Terimakasih sudah bersama-sama mengatasi masalah ini," ujar Syaikhu.



Saadiah: Keterlibatan Perempuan Maluku Majukan Perekonomian Daerah

Perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan dan merupakan pengguna hasil pembangunan. Perempuan juga memiliki kepentingan yang khusus, membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian dan sosio kultural yang ada

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Ambon (02/02) — Perempuan Maluku dibutuhkan peran dan keterlibatannya secara mendalam dalam rana pembangunan di daerah. Keterlibatan perempuan dianggap sangat penting dalam memajukan perekonomian daerah. Peran perempuan Maluku juga dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai kehidupan sektoral.

Penegasan ini disampaikan oleh Anggota DPR Asal Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, ST ketika menyampaikan gagasannya Tentang Kebijakan Riset dan Teknologi Dalam Pemberdayaan Perempuan pada Seminar Nasional yang digelar oleh

Pimpinan Wilayah Aisyiah Maluku di Gedung Asari Ambon, Kamis (30/1)

Hadir sebagai salah satu narasumber, Saadiah menyebut, menjadi keharusan bagi perempuan untuk berperan dalam urusan domestik. Namun baginya semakin banyak perempuan Maluku terlibat dalam urusan publik, bukan saja menjawab masalah ketimpangan gender, sekaligus memastikan terwujudnya peran aktif dan kontributif bagi kemajuan pembangunan di daerah.

Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Maluku dalam wilayah publik, menjadi penopang yang

menguatkan daya dukung perempuan Maluku bagi kepentingan pembangunan daerah. “Secara tidak langsung juga memberdayakan dan menularkan semangat positif bagi bangsa secara keseluruhan”, detail Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Saadiah menegaskan, perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan dan merupakan pengguna hasil pembangunan. “Perempuan yang memiliki kepentingan yang khusus, membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian dan sosio kultural yang ada”, terangnya.

Dirinya menyebut adanya ketimpangan keberpihakan kepada perempuan yang harus segera dibenahi. “Kita dihadapkan pada persoalan serius, salah satunya masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan di Maluku”, kata Saadiah.

Tidak berhenti di situ, Saadiah juga mensinyalir jika akses dan manfaat pembangunan bagi perempuan masih rendah. “Termasuk perempuan Maluku belum memiliki pangung yang memadai untuk terlibat dalam



pengambilan keputusan penting dan strategis”, imbuh Saadiah.

Maka, sudah waktunya pemerintah daerah untuk menegaskan visi baru pemberdayaan perempuan Maluku. “Tema besarnya, mewujudkan kesetaraan partisipatif dan menjadikan perempuan Maluku jauh lebih berdaya saing”, paparnya.

Menurutnya, Perempuan Maluku semestinya dikuatkan kemampuan softskill oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar semakin berdaya. “Perempuan Maluku harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menguatkan positioning dalam aktifitas sektoral dengan mindset inovatif”, harapnya.

Nasir Djamil,

Terima Aduan Pekerja Outsourcing PT Pertamina Rantau, Aceh Tamiang

Untuk kasus seperti ini kita semua (DPRK Aceh Tamiang, Bupati Aceh tamiang, DPRA dan DPR-RI) harus saling berkolaborasi di setiap level agar penyelesaiannya cepat didapatkan

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota DPR RI Dapil Aceh I

Aceh (07/02) — Didampingi Anggota DPR Aceh (DPRA) dan anggota DPRK Tamiang, Ruslan, perwakilan dari eks pekerja "out sourcing" di Pertamina EP Rantau, Aceh Tamiang, mengadakan "nasibnya" ke Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI, Nasir Djamil, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Ruslan dan kawan-kawannya sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 28 tahun minta agar perusahaan mempekerjakan mereka kembali.

"Kami berharap agar Pertamina EP Rantau bisa kembali mempekerjakan dan memperhatikan hak kami," kata Ruslan seraya menyerahkan dokumen dan daftar eks pekerja outsourcing di ruang kerja Nasir Djamil.

Kehadiran Ruslan didampingi Nora Indah Nita (anggota DPRA), Fadlon (Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang), Miswanto, Muhammad Nur, Dedi suriansah (Anggota DPRK Aceh Tamiang).

Dalam aduannya, perwakilan pekerja yang tergabung dalam KSBSI

(Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) menyampaikan putusan PHI yang memenangkan mereka namun eksekusi putusan tidak dilakukan.

Menanggapi aduan tersebut, Nasir Djamil menjelaskan, upaya ini harus dilakukan bersama-sama antara DPRK Aceh Tamiang, Bupati Aceh Tamiang, DPRA dan DPR-RI.

"Untuk kasus seperti ini kita semua (DPRK Aceh Tamiang, Bupati Aceh tamiang, DPRA dan DPR-RI) harus saling berkolaborasi di setiap level agar penyelesaiannya cepat didapatkan," sebut Nasir, politisi PKS.

Anggota Forbes lainnya, Rafli yang duduk di Komisi VI tak lama berselang hadir dalam pertemuan tersebut, dan berjanji akan menyampaikan keluhan mereka ke Kementerian BUMN.

"Kita sudah dapat masukan dari ketua (Nasir



Djamil), Insha Allah akan kita sampaikan dalam rapat dengan Pak Menteri Erick Thohir," tanggap Rafli.

Diakhir pertemuan Nasir Djamil menginisiasi adanya pertemuan khusus untuk menemui Field Manager Pertamina EP Rantau sekaligus mempertanyakan kasus ini. Kasus Pertamina EP

Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan kasus yang terbilang cukup lama sejak tahun 2012 dan belum ada jalan keluar.

"Kita harapkan semoga permasalahan yang telah lama ini bisa kita dorong untuk penyelesaian, karena ini menyangkut hak ratusan pekerja," tutup Nasir.

Rofik Hananto Sosialisasi 4 Pilar MPR Bersama Ratusan Pelajar

“Sosialisasi 4 Pilar MPR ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh anak-anak muda / pelajar sejak dini, karena mereka adalah generasi yang akan menentukan masa depan bangsa ini,

H. ROFIK HANANTO, S.E.

Anggota MPR RI

Banjarnegara (07/02) Anggota MPR RI FPKS dari Dapil Jawa Tengah VII H. Rofik Hananto, S.E. mengadakan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI bersama Ratusan Siswa Kelas XII dan Guru SMK Negeri 1 Bawang.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan pemahaman tentang 4 Pilar MPR RI sejak dini. 4 Pilar MPR terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa.

“Sosialisasi 4 Pilar MPR ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh anak-anak

muda / pelajar sejak dini, karena mereka adalah generasi yang akan menentukan masa depan bangsa ini, agar ketika mereka memimpin kedepannya sudah memahami betul bagaimana negeri ini didirikan, tujuan didirikan dan apa yang harus mereka lakukan kedepannya.” Tutur Rofik

Rofik menjelaskan dengan sangat interaktif sehingga Para peserta begitu antusias mengikuti materi yang disampaikan sampai dengan akhir, tidak jarang rofik memberikan hadiah kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan yang disampaikan, dan pesertapun berebut untuk menjawabnya.

Salah seorang peserta Dimas (17) mengatakan: “Pak Rofik Mengingatkan sejarah

terbentuknya bangsa ini, dan menjelaskan 4 Pilar Kebangsaan MPR RI dengan sangat menyenangkan dan friendly, sehingga sangat antusias”

Dalam acara sosialisasi ini, Pria kelahiran Purbalingga ini juga memberikan motivasi kepada Para Peserta agar mereka menjadi anak Muda yang optimis, karena masa depan negeri ini sangat tergantung dari sikap, karakter, visi, keberanian anak muda semua.

Disesi akhir Rofik Hananto menyerahkan secara simbolis bantuan paket buku materi 4 Pilar kebangsaan untuk perpustakaan SMK N 1 Bawang yang diterima langsung oleh kepala perpustakaan Bapak Deni Syarif Fatullah, S.Pd dan juga menyerahkan bantuan sarana ibadah untuk Masjid Sekolah uang senilai Rp. 10.000.000 diterima langsung oleh bendahara Takmir masjid Ibu Drs. Maria.

Drs. Maria menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan, beliau juga mendoakan agar Rofik Hananto dimudahkan dalam menjalankan amanahnya, serta dilancarkan segala urusannya.



Seminar الموضوع

الشباب البرلمانيون ودورهم السياسي

Young parliamentarians and their political role

الموعد: الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٠
الوقت: من ١٣:٠٠ نهارا إلى ١٦:٠٠ مساءً
المكان: قاعة الجلسات العامة لكتلة
حزب العدالة والرفاهية

Kamis, 13 Februari 2020
Pk. 13.00 s.d 16.00 WIB
di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI
Gd. Nusantara I Lt. 3

المحاضر الرئيسي:
الدكتور محمد صاحب الإيمان
رئيس حزب العدالة والرفاهية

كلمة:
الدكتور جزولي جويني
رئيس كتلة حزب العدالة والرفاهية /
نائب رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين

Sambutan
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI /
Wakil Ketua IIFP (The International Forum for Islamists Parliamentarians)

Keynote Speaker:
Mohamad Sohibil Iman, Ph.D
Presiden PKS

المحاضرون:
الدكتور عبد المجيد مناصرة
رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين

الدكتور مولود دحماني
الجزائر

الدكتور سوكامتا
رئيس وكالة العلاقات الخارجية لحزب العدالة
الرفاهية، نائب رئيس الكتلة

إسماعيل بختيار
عضو البرلمان من سولاويسي جنوبية

إيفان يوسمانتي
رئيس حركة الطلبة المسلمين الإندونيسيين

رئيس الجلسة
ياندرو إدوار

Pembicara
Dr. Abdul Majid Manasrah
Ketua Internasional Forum for Islamists Parliamentarians

Dr. Maulud Dahmani
Aljazir

H. Sukamta, Ph.D

Ketua Internasional Forum for
Islamists Parliamentarians

Ismail Bachtiar
Anggota DPRD Sulawesi Selatan, PKS MUDA Sulsel

Elevan Yusmanito
Ketua Umum PP KAMMI

Moderator
Yoandro Edwar



Sikapi Hasil Survei INSIS, Aboe Bakar: Doakan PKS Istiqomah!

Insha Allah PKS akan selalu konsisten dalam menyambung suara rakyat. Mohon doa dari segenap masyarakat agar PKS diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat

Habib ABOE BAKAR ALHABSYI

Bendahara Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (02/02) — Anggota DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mengapresiasi capaian Fraksi PKS DPR, dalam publikasi hasil kajian riset data media monitoring Institut Riset Indonesia (Insis).

Menurut Aboe, *Alhamdulillah* apa yang menjadi hasil kajian riset data media monitoring Insis, menjadi berita gembira untuk PKS.

"Ini adalah kado gembira untuk PKS saat menyambut hari pers nasional. Hasil riset tersebut merupakan salah satu indikator bahwa PKS sangat terbuka dengan media", ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe.

Habib Aboe menambahkan

banyaknya statemen politik dari aleg PKS yang dikutip oleh media, menunjukkan bahwa politisi PKS sangat welcome dengan para wartawan.

"Bahwa PKS dilihat sebagai partai politik yang paling maksimal dalam menggerakkan politisinya untuk berkomentar di media massa adalah bagian dari upaya partai dalam menjalankan fungsinya," pungkas Bendahara Fraksi PKS ini.

Menurutnya, ini adalah bagian dari keseriusan PKS dalam menjalankan tugas di Parlemen.

"Kita menyadari bahwa staement publik melalui media massa adalah bagian dari

upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat", tuturnya.

Capaian ini, lanjut Aboe, tentunya akan semakin membuat semangat para anggota DPR dari PKS untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat.

"Insha Allah PKS akan selalu konsisten dalam menyambung suara rakyat. Mohon doa dari segenap masyarakat agar PKS diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat", tutup Habib Aboe.

Foto :
dpr.go.id





الذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا

سَلَامٌ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّا لَإِلَيْهِ رَاغِبُونَ

Atas nama keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah
Pengasuh Ponpes Tebuireng,

Dr. Ir. KH. **SALAHUDDIN WAHID**

Pada Ahad 2 Februari 2020, pk. 20.55 WIB
di RS Harapan Kita Jakarta

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik Jannah-Nya
Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Gus Sholah Wafat

PKS Sangat Kehilangan Orang Tua dan Panutan Yang Luar Biasa

Nasehat-nasehatnya selalu menyejukkan, mengayomi dan menyatukan umat bangsa dan negara. Indonesia kehilangan tokoh dan ulama panutan yang luar biasa bagi bangsa ini,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (2/1) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa sangat kehilangan atas wafatnya KH. Shalahuddin Wahid atau Gus Sholah, Cucu Pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari pada Ahad (2/1).

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Fraksi PKS DPR kami merasa sangat kehilangan beliau. Kami sampaikan duka cita mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan, Ibu Nyai, putra-putri beliau dan seluruh keluarga besar semoga diberi kesabaran dan keikhlasan," ungkap Jazuli.

Ketua Fraksi PKS ini punya kesan mendalam dengan Gus Sholah karena cukup dekat dan rutin mengunjungi beliau untuk silaturahmi dan meminta nasihat masalah-masalah

keummatan dan kebangsaan.

"Beliau ini kami anggap orang tua kami di PKS. Beliau selalu terbuka menerima kami, membesarkan hati kami, dan selalu mendukung perjuangan kami. Nasehat-nasehatnya selalu menyejukkan, mengayomi dan menyatukan umat bangsa dan negara. Indonesia kehilangan tokoh dan ulama panutan yang luar biasa bagi bangsa ini," ungkap Jazuli.

Menurut Jazuli, Gus Sholah punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin bangsa ini bersatu dan bersinergi, tidak saling curiga dan benci, tidak ada yang merasa paling Indonesia lalu memarginalkan yang lain. Seluruh warga negara

adalah bagian dari bangsa yang punya peran dan kontribusi untuk kemajuan Indonesia.

Jazuli Juwaini juga menilai sosok Pengasuh Pesantren Tebuireng ini sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap umat dan dunia pendidikan khususnya pendidikan pesantren. Pikiran-pikiran beliau mewarisi cara pandang para ulama dan tokoh umat yang besar sekali kontribusinya dalam kemerdekaan Indonesia.

"Pemikiran Gus Sholah sangat mencerahkan dan membimbing umat bagaimana mewarisi Indonesia yang diperjuangkan oleh para ulama agar tetap kokoh dan bersatu dalam keberagaman dan kemajuan. Nasihat dan pemikiran beliau bahkan secara terbuka kami sampaikan menjadi rujukan dalam merumuskan program-program Fraksi PKS di DPR sehingga PKS semakin kokoh dalam berkhidmat untuk rakyat dan umat," pungkasnya.

"Selamat jalan Kyai, Allahummaghfirlahu warhamhu waafihhi wa'fuanhu. Kami bersaksi beliau min ahliil khoir, insya Allah husnul khotimah", doa Jazuli.



HNW Pimpin Doa untuk Almarhum Gus Sholah

Saya juga tidak tahu sepertinya spontan, saya juga tidak paham bahwa sejak kemarin sore menjenguk beliau di rumah sakit jam 5 seperempat. Kemudian tadi malam saya juga ikut salat jenazah di sini, tadi malam sebenarnya saya juga diminta untuk mendoakan beliau pada setelah tahlilan

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (03/02) — Anggota DPR RI yang juga Wakil Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid memimpin doa pelepasan jenazah KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sebelum dimakamkan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

"Ya spontan, saya tadi ditunjuk oleh Mas Ipang Wahid dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan itu. Saya berharap bahwa doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala," kata Hidayat di kediaman Gus Sholah, Jakarta Selatan, Senin (3/2).

HNW mengaku bukan hanya memimpin doa pelepasan jenazah Gus Sholah. Dia juga mengaku bakal memimpin tahlilan atau ta'ziyah ke rumah Gus Solah pada malam hari.

"(Mimpin doa) Saya juga tidak tahu sepertinya spontan, saya juga tidak paham bahwa sejak kemarin sore menjenguk beliau di rumah sakit jam 5 seperempat. Kemudian tadi malam saya juga ikut salat jenazah di sini, tadi malam sebenarnya saya juga diminta untuk mendoakan beliau pada setelah tahlilan," ujarnya.

Dengan ditunjuknya

Hidayat untuk memimpin doa, ia menilai adanya keterbukaan dari keluarga Gus Sholah kepada semua orang yang ingin membawa kebaikan.

"Yang ingin mendoakan doa kita adalah beliau Khususul Khotimah, keluarga diberi ketabahan, beliau diterima oleh Allah di surganya dan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan beliau," ucapnya.



Wafatnya Gus Sholah, PKS Kehilangan Permata Bangsa

Beliau adalah seorang ulama yang sangat atensi terhadap HAM. Beliau memiliki komitmen yang kuat dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM di republik ini

Habib ABOE BAKAR ALHABSYI

Bendahara Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (03/02) — Indonesia berduka, dengan wafatnya ulama kharismatik yang menjadi panutan, KH. Sholahuddin Wahid, pada Ahad (2/2).

Anggota DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mengaku kehilangan salah satu permata bangsa.

"Gus Sholah adalah ulama sekaligus negarawan yang sudah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Tentunya kepergiannya membawa duka yang mendalam untuk bangsa ini," tutur Bendahara Fraksi PKS ini.

Sebagai Ulama lanjut Aboe, Gus Sholah aktif menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebureng di Jombang, Jawa Timur. Setelah belasan tahun

Tebu Ireng beliau asuh, banyak sekali kemajuan dan perkembangan yang dicapai.

"Tentunya ini membawa dampak yang luar biasa untuk kemajuan masyarakat, utamana dibidang pengetahuan, ilmu agama dan akhlak", pungkas pria yang akrab disapa Habib Aboe.

Selain sebagai ulama, tambah Habib Aboe, Gus Sholah dikenal sebagai aktivis dan tokoh HAM di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua Komnas HAM sejak tahun 2002, pernah memimpin TGPF kasus Kerusuhan Mei 1998, hingga menjabat sebagai Ketua Tim Penyelidik Adhoc Pelanggaran

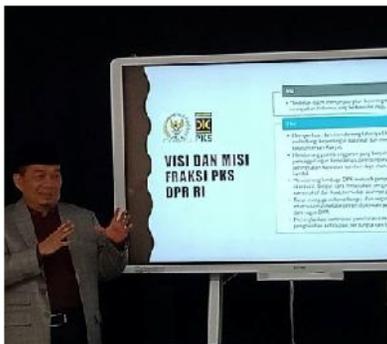
HAM Berat kasus Mei 1998.

"Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat atensi terhadap HAM. Beliau memiliki komitmen yang kuat dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM di republik ini", tandasnya.

Karenanya, Habib Aboe menyampaikan keluarga besar PKS merasa sangat kehilangan dengan wafatnya beliau. Kami semua memberikan doa terbaik untuk beliau dan keluarga.

"Semoga amal dan ibadahnya diterima Allah SWT dan diampunkan segala khilafnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kelapangan", tutup Habib Aboe.





KUNJUNGAN

Berikan Kuliah Umum di Univ. Kyoto Jepang

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA memberikan kuliah umum di depan para Guru Besar dan Mahasiswa pasca Sarjana Universitas Kyoto Jepang dengan Tema; "Risalah Perjuangan Fraksi PKS DPR RI" Selama 2 Jam beserta sesi tanya jawabnya, Rabu, 5 Februari 2020



KUNJUNGAN

Terima Penghargaan

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini, MA menerima penghargaan dari Universitas Kyoto atas Bukunya yang berjudul : "Risalah Perjuangan Fraksi PKS DPR RI" Yang disampaikan dalam kiliyah Umum di depan Para Guru Besar dan Mahasiswa Pasca sarjana Universitas Kyoto Jepang.



KUNJUNGAN

Undangan Rektor Ritsumaekan University

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Jazuli Juwaini, MA diundang makan malam oleh Prof. Dr. Yasuahi Kosugi, Direktur Asia-Jepang Riset Institut yang juga Rektor Ritsumaekan University, pada Kamis 6 Februari 2020. Prof Kosugi merupakan seorang Muslim, dan Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir.



BALEG

Diskusi Menyikapi pro Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja

Jakarta (06/02) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Drs. H. Adang Daradjatun hadir sebagai narasumber dalam diskusi "Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, pada Kamis 06 Februari 2020 di Balai Sidang UI. Depok

MKD

Kunker MKD ke Kepulauan Riau

Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang dipimpin Habib Aboe Bakar Alhabsyi melakukan kunjungan kerja ke kepulauan Riau. Rabu 5 Februari 2020. Kunjungan ini dalam rangka menerima masukan Polda, Kejaksaan dan DPRD serta Civitas Akademika Kepulauan Riau #mkddpri

DAPIL

Santunan keluarga korban banjir wafat

Sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam penanganan bencana alam di Indonesia, pada Kamis siang, Kementerian Sosial menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat banjir di Jakarta awal tahun 2020 lalu. Pada tahap ini, Kemensos menyerahkan bantuan kepada 9 orang ahli waris dengan nilai masing-masing sebesar 15 Juta Rupiah. Penyaluran santunan yang berlangsung di Kantor Walikota Jakarta Pusat ini diberikan langsung oleh Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nurwahid bersama PLH Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Syafii Nasution

PROFIL

KH. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A



KELUARGA

Kawah Lahirnya pemimpin Bangsa

Gerimis jatuh bersama teman-temannya, datang bergerombol menjadi hujan deras. Jaga kesehatan rekan dan sahabat semua.

Kali ini kita akan berinteraksi dengan anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jateng 1 yaitu KH Bukhori Yusuf Lc, MA. Atau yang akrab disapa kang bukhori. Jika Partai Demokrat punya SBY sebagai icon tunggal memegang otoritas, PKS juga sebenarnya punya SBY namanya Syekh Bukhori Yusuf (SBY).

KH Bukhori Yusuf, Lc., M.A. lahir pada tanggal 5 Maret 1965. Pria yang tertarik menekuni bidang agama ini

telah menikah dengan seorang wanita bernama Rosita Komala Dewi. Dari pernikahannya dengan Rosita, beliau telah dikaruniai 4 orang anak 2 laki-laki, 2 perempuan.

Saat ini Syekh Bukhori Yusuf tergabung di komisi VIII, Kehausan terhadap ilmu agama Islam membawa dirinya sampai pada salah satu Universitas ternama di Arab Saudi yaitu universitas Islam Madina KSA, utk menempuh pendidikan S1 nya di fakultas Hadist Ilmu Hadits dan Studi Islam, serta Wifaq Madaris Salafiyah untuk menempu S2 nya. Selain berkiperah dalam bidang agama,

SBY juga dikenal sebagai politikus Indonesia yang bernaung di bawah panji Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Disamping sebagai ulama dan anggota DPR, Syekh Bukhori Yusuf juga menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Dirasat Islamiah Al-Hikmah, Jakarta.

pesan untuk keluarga indonesia "jadikan keluarga sebagai kawah candradimuka untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa ke depan"

SOCMED

Untuk mengetahui semua kegiatan parlemen KH Buchori Yusuf, Lc, MA dapat mengikuti social media:

Facebook | Bukhori Yusuf
Twitter | @buchori_sby
Instagram | @bukhori_bkh



Jadikan keluarga
sebagai kawah
candradimuka untuk
melahirkan calon-calon
pemimpin bangsa ke
depan"



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI

fraksi.pks.id